

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



2017 - 2022



RPJMD
KABUPATEN
PATI

BAB VI

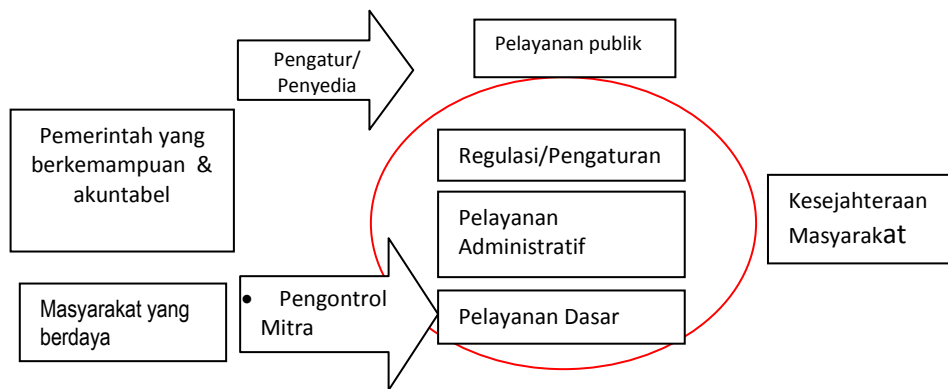
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Sementara itu, arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah, kabupaten Pati merencanakan serangkaian strategi yang akan dijalankan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan visi: "**Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik**".

Hubungan visi dan misi kabupaten Pati 2017-2022 digambarkan melalui gambar VI.1. bahwa Visi Kabupaten Pati adalah mencapai dua keadaan ideal yaitu: (i) meningkatnya kesejahteraan rakyat dan (ii) meningkatnya kualitas pelayanan publik. Pencapaian kedua keadaan ideal tersebut memerlukan landasan kokoh yang harus dibangun selama kurun 2017-2022. Landasan dasar sebagai komponen utamanya adalah: (i) pemerintah yang berkemampuan dan akuntabel, serta (ii) masyarakat yang berdaya. Pemerintah memainkan peran sebagai regulator, distributor, dan alokator sumberdaya untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Sementara, warga memainkan peran sebagai produsen, mitra, dan juga pengawas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Sinergitas kerjasama antara pemerintah dan masyarakat akan menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kondisi tersebut memerlukan serangkaian strategi dan arah kebijakan untuk menjalankan ke-8 misi secara sinergis.

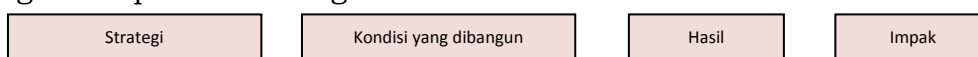


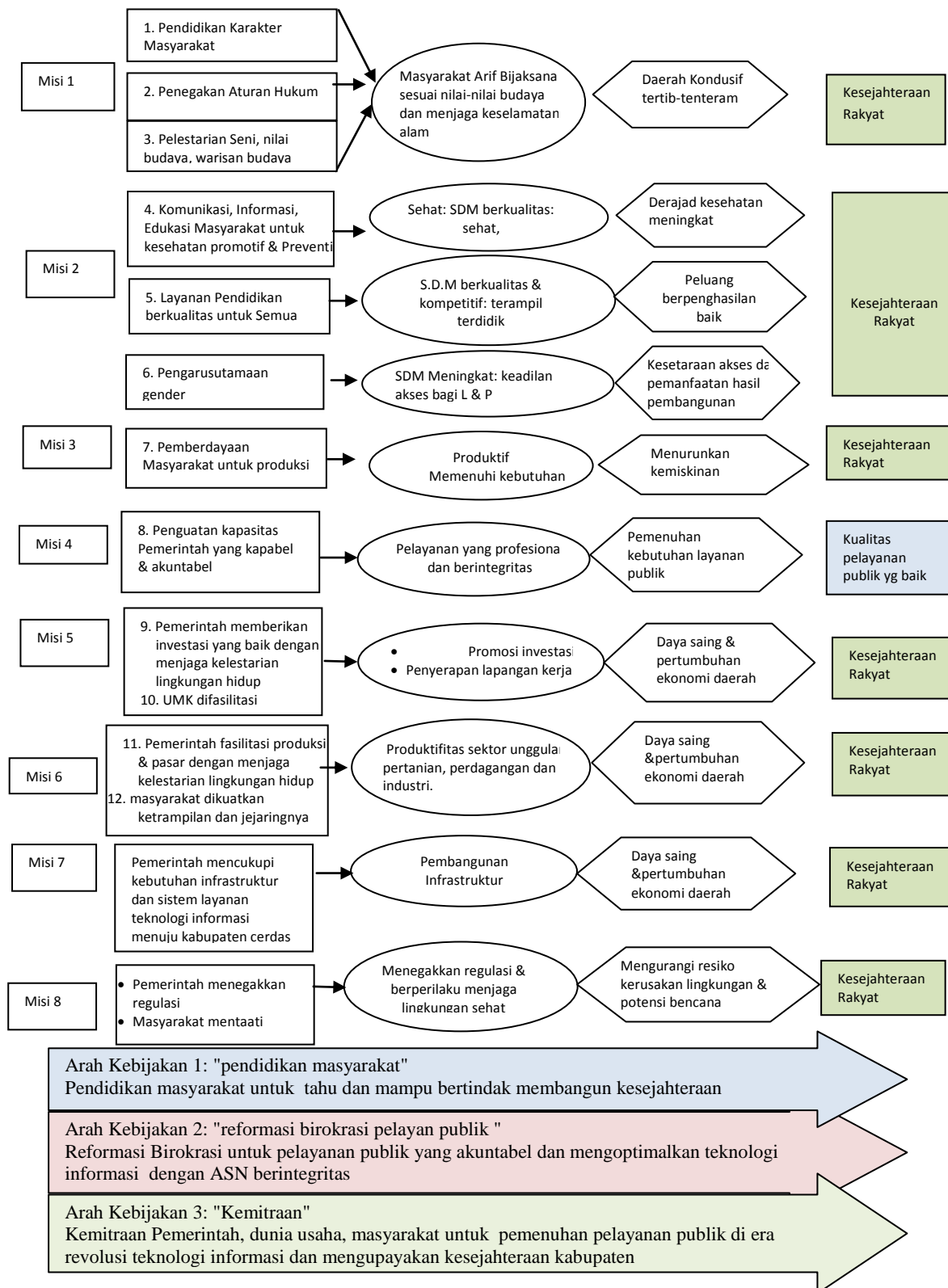
Gambar VI.1
Skema Visi Kabupaten Pati

Perumusan strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan hasil analisis KLHS supaya mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun **Analisis KLHS untuk penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan Pati tahun 2017-2022** dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penurunan daya dukung air terhadap akses air bersih;
- 2) Pengurangan jasa ekosistem ketersediaan pangan, air bersih, dan keanekaragaman hayati;
- 3) Dampak perubahan iklim mengancam peningkatan erosi, longsor dan sedimentasi serta menurunnya fungsi pengendali air sehingga pada musim hujan terjadi banjir dan musim kemarau terjadi kekeringan. Hal tersebut memunculkan adanya wilayah rawan bencana alam dan iklim.
- 4) Intensifikasi untuk mengejar produktivitas dengan bahan kimia secara tidak langsung mengancam kesehatan manusia dari konsumsi produk pangan pertanian;
- 5) Penanggulangan kelompok miskin rentan terhadap isu pembangunan berkelanjutan, dengan beberapa penyebabnya adalah:
 - a. Pemanfaatan hasil ekstraksi alam tanpa kontrol untuk penyediaan pangan dan energi berisiko menurunkan keragaman hayati;
 - b. Persentase masyarakat miskin terbesar merupakan petani. Hal tersebut diantaranya karena penerapan sistem budidaya pertanian yang kurang efektif serta adanya perubahan iklim yang berpotensi menyebabkan gagal panen.
- 6) Diperlukan penambahan strategi untuk: (i) Peningkatan pengelolaan sampah, limbah industri, dan limbah domestik; (ii) Peningkatan kualitas dan kuantitas air dengan mempertahankan tutupan lahan hijau; (iii) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Dengan mempertimbangkan analisis KLHS tersebut, maka Rangkaian strategi ditampilkan dalam gambar berikut.





Gambar VI.2.
Rangkaian Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Visi
"Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik"

Rangkaian strategi pendukung misi sebagai berikut:

- a) Misi 1 akan dijalankan melalui strategi (i) Pendidikan Karakter Masyarakat, (ii) Penegakan Aturan Hukum, dan (iii) Pelestarian Seni, Nilai Budaya, Warisan Budaya. Serangkaian strategi tersebut diharapkan mewujudkan masyarakat arif bijaksana sesuai nilai-nilai budaya. Kualitas masyarakat arif bijaksana sesuai nilai-nilai budaya diharapkan menghasilkan daerah

- kondusif tertib-tenteram. Daerah yang kondusif lebih berpotensi menarik masyarakat luar daerah yang akan berujung daya saing daerah dan kesejahteraan rakyat;
- b) Misi 2 akan diimplementasikan melalui strategi yang menangani urusan kesehatan dan urusan pendidikan yaitu: (i) Komunikasi, Informasi, Edukasi Masyarakat untuk Kesehatan Promotif dan Preventif serta KB; (ii) Layanan Pendidikan berkualitas untuk Semua, (iii) Pengarusutamaan Gender. Jika strategi-strategi tersebut dijalankan diharapkan menghasilkan SDM yang berkualitas, produktif, dan kompetitif baik laki-laki maupun perempuan. Kondisi tersebut akan menghasilkan kondisi masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam kondisi derajat kesehatan baik, peluang mendapatkan pekerjaan dan penghasilan meningkat, serta kesetaraan akses bagi perempuan dan laki-laki, sehingga peluang kontribusi perempuan di bidang ekonomi dan sosial budaya akan meningkat.
 - c) Misi 3 akan dijalankan dengan strategi pemberdayaan masyarakat untuk produksi, sehingga akan menghasilkan kondisi masyarakat produktif memenuhi kebutuhan. Masyarakat yang produktif membantu menurunkan kemiskinan dan menghasilkan masyarakat yang sejahtera.
 - d) Misi 4 dijalankan dengan strategi penguatan kapasitas pemerintah yang kapabel dan akuntabel untuk menciptakan kondisi pelayanan yang profesional dan berintegritas dalam rangka menghasilkan pemenuhan kebutuhan layanan publik. Dampaknya akan tercipta kualitas pelayanan publik yang baik.
 - e) Misi 5 dijalankan melalui strategi (i) pemerintah memfasilitasi produksi dan pasar; (ii) masyarakat dikuatkan keterampilan dan jejaringnya, untuk menciptakan kondisi perluasan promosi dan meningkatkan investasi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan (*green investment*), serta penyerapan lapangan kerja. Kondisi ini sebagai perangsang daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - f) Misi 6 dijalankan dengan (i) pemerintah memfasilitasi produksi dan pasar dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup, (ii) masyarakat dikuatkan keterampilan dan jejaringnya untuk menciptakan kondisi produktivitas sektor unggulan: pertanian, perdagangan dan industri. Kondisi ini sebagai pendorong terciptanya daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup, biodiversitas, dan risiko bencana.
 - g) Misi 7 dijalankan melalui strategi pemerintah mencukupi kebutuhan infrastruktur untuk menghasilkan kondisi ketersediaan infrastruktur yang memadai dalam kondisi baik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, untuk mendukung daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan infrastruktur termasuk sarana prasarana teknologi komunikasi untuk mengembangkan *smart city* (Kota Cerdas).
 - h) Misi 8 dijalankan dengan strategi (i) Pemerintah menegakkan regulasi dan (ii) Masyarakat berperilaku menjaga lingkungan sehat. Kondisi ini diharapkan menjadi pemacu mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan potensi bencana sehingga menciptakan kesejahteraan rakyat. Berdasar analisis KLHS, strategi ini dilengkapi dengan tindak lanjutnya berupa:
 - 1) Pengembangan perencanaan, kebijakan fiskal dan keberpihakan investasi yang ramah lingkungan;

- 2) Pengembangan skema insentif dan disinsentif dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 3) Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dan mendukung mitigasi bencana;
- 4) Peningkatan pengelolaan sampah, limbah industri dan limbah domestik;
- 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas air dengan mempertahankan tutupan lahan hijau;
- 6) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan;
- 7) Pemasyarakatan mitigasi bencana.

Rangkaian strategi untuk mencapai **Visi "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik"** tersebut digerakkan melalui arah kebijakan berikut:

- a. Kelompok arah kebijakan pendidikan masyarakat, yang terdiri dari:
 - 1) Pendidikan Karakter masyarakat untuk mengenali & melestarikan warisan budaya, serta bertindak menurut nilai-nilai keunggulannya.
 - 2) Meningkatkan keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menyeluruh pada setiap aspek kehidupan.
- b. Kelompok arah Kebijakan reformasi birokrasi penyediaan layanan:
 - 1) Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar.
 - 2) Reformasi Birokrasi untuk pelayanan yang akuntabel dan ASN berintegritas.
- c. Kelompok arah Kebijakan Kemitraan:
 - 1) Kemitraan Pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk pembangunan kesehatan masyarakat.
 - 2) Kemitraan Pemerintah, dunia usaha, masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas untuk semua.
 - 3) Kemitraan Pemerintah, dunia usaha, masyarakat untuk pengarusutamaan gender di semua bidang kehidupan.
 - 4) Kemitraan Pemerintah, dunia usaha, masyarakat untuk memperkuat daya saing tenaga kerja serta relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan.
 - 5) Kemitraan Pemerintah, dunia usaha, masyarakat untuk penambahan penyerapan tenaga kerja dan lapangan usaha, dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
 - 6) Kemitraan pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten sekitar dalam kawasan wilayah pengembangan Wanarakuti untuk:
 - (a) Pengembangan investasi dan inovasi produktivitas sektor pertanian, perdagangan dan industri dengan meminimalisir alih fungsi lahan, sehingga pelayanan publik lebih optimal dan berkesinambungan.
 - (b) Perluasan pasar dan variasi komoditas industri kreatif dan industri berbahan baku lokal dari masyarakat dengan memperhatikan keselamatan lingkungan dan mengurangi risiko bencana.
 - 7) Kemitraan pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten sekitar dalam kerjasama PAKUDJEMBARA untuk pembangunan dan penguatan kelembagaan pariwisata.
 - 8) Kemitraan Pemerintah, dunia usaha, masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, infrastruktur konektivitas dan pendukungnya.
 - 9) Kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan risiko bencana.

Selanjutnya akan disajikan secara menyeluruh keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 dalam tabel berikut.

Tabel VI.1
Keterkaitan antara Visi, Misi, Sasaran, dan Strategi

| Visi: "Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik". | | |
|---|--|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi |
| Misi 1: Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal. | | |
| Tujuan 1.1. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya | Sasaran 1.1.1. Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat | 1.1.1.1. Pendidikan karakter dan akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal; 1.1.1.2. Peningkatan kenyamanan lingkungan; |
| | 1.1.2.Meningkatnya pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai-nilai budaya | 1.1.2.1. Pelestarian Seni , nilai budaya, warisan budaya. |
| MISI 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. | | |
| Tujuan 2.1. Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan | 2.1.1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat | 2.1.1.1. Komunikasi, Informasi, Edukasi Masyarakat untuk kesehatan promotif, Preventif, yaitu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Keluarga Berencana |
| | 2.1.2.Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan | 2.1.2.1 Penyelenggaraan Layanan Pendidikan (formal dan nonformal) yang berkualitas untuk Semua; |
| | 2.1.3. Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan | 2.1.3.1.Penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di semua PD; 2.1.3.2. Peningkatan peran lembaga perempuan dalam pembangunan gender. |
| MISI 3: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. | | |
| Tujuan : 3.1. Penurunan tingkat kemiskinan | 3.1. 1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin | 3.1.1.1.Perluasan kesempatan kerja dan produktivitas melalui pengembangan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha dan organisasi masyarakat untuk; 3.1.1.2. Peningkatan kapasitas masyarakat desa terutama ketahanan ekonomi melalui penguatan lembaga ekonomi perdesaan dan kelompok masyarakat; 3.1.1.3. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana dasar bagi masyarakat miskin dan rentan; 3.1.1.4. Peningkatan kualitas lingkungan sehat perumahan. |
| | 3.1.2. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial | 3.1.2.1. Pengembangan perlindungan dan pemberdayaan PMKS melalui |

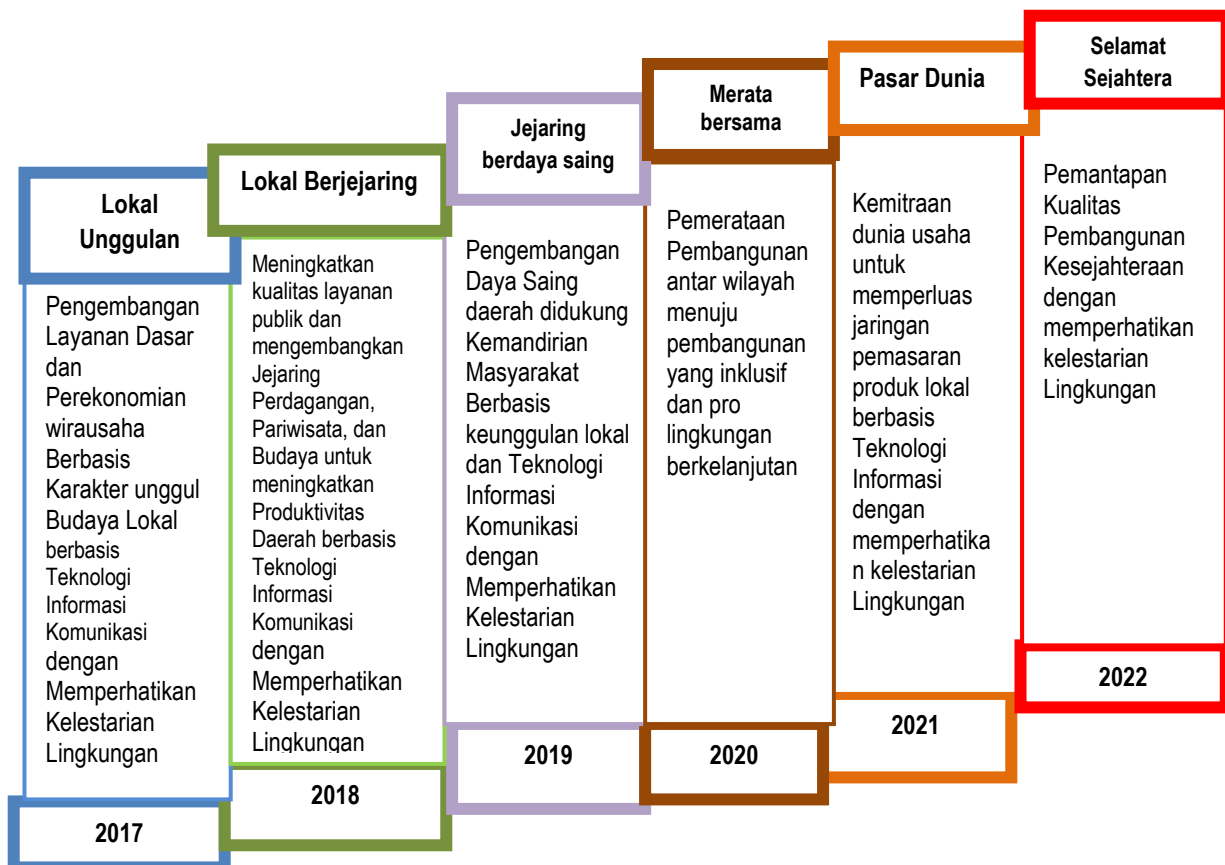
| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|--|---|--|
| | | pelatihan vokasi dan peningkatan kesempatan kerja. |
| MISI 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik. | | |
| Tujuan: 4.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik | 4.1.1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten | 4.1.1.1. Perencanaan dan penganggaran berbasis data, ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi berbasis TIK; 4.1.1.2. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan kapasitas dan profesionalitas aparatur, pengembangan TIK dan inovasi daerah; 4.1.1.3. Harmonisasi regulasi yang berbasis kajian kelitbangan. 4.1.1.4. Pengembangan dan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan transparan, dan penerapan SPIP; |
| | 4.1.2. Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah | 4.1.2.1. Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah melalui efisiensi anggaran, pengelolaan sumber-sumber pendapatan, dan penataan aset daerah. |
| MISI 5: Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja. | | |
| Tujuan 5.1. Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah | 5.1.1. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | 5.1.1.1. Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui upaya peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga kerja, |
| | 5.1.2. Meningkatnya produktivitas KUM | 5.1.2.1. Kemitraan dengan pihak ketiga untuk mencari pasar produk usaha mikro; 5.1.2.2. Pengembangan kewirausahaan berbasis Teknologi informasi sebagai bagian dari smart city; 5.1.2.3. Peningkatan manajemen koperasi. |
| MISI 6: Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri. | | |
| Tujuan: 6.1. Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah | 6.1.1. Meningkatnya produktivitas dan inovasi di bidang/ sektor pertanian, perdagangan dan industri | 6.1.1.1. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi ramah lingkungan, kerjasama pemasaran dengan daerah lain serta pemanfaatan teknologi informasi. 6.1.1.2. Peningkatan kapasitas pedagang lokal melalui perlindungan pasar tradisional, peningkatan manajemen pasar daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi. |

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|--|--|---|
| | | 6.1.1.3. Peningkatan produksi industri melalui penerapan teknologi industri ramah lingkungan, dan pengembangan sentra industri potensial. |
| | 6.1.2. Meningkatnya Investasi Daerah. | 6.1.2.1. Peningkatan kepastian investasi dan kondusivitas usaha dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. 6.1.2.2. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. |
| | 6.1.3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. | 6.1.3.1. Peningkatan keragaman sumber pangan masyarakat serta Pemerataan distribusi sumber pangan daerah selaras dengan upaya penanggulangan kemiskinan daerah. |
| | 6.1.4. Meningkatnya daya saing daerah. | 6.1.4.1. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian dan perikanan melalui intensifikasi, dan penguatan kelembagaan; 6.1.4.2. Perluasan pasar dan pengembangan komoditas industri pengolahan pertanian, perikanan dan industri kreatif melalui peningkatan kapasitas pelaku industri. 6.1.4.3. Pengembangan destinasi wisata unggulan melalui peningkatan sarana prasarana, penguatan kapasitas pelaku, dan promosi wisata. |
| Misi 7: Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah. | | |
| Tujuan: 7.1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah | 7.1.1. Terpenuhinya infrastruktur bagi pengembangan produktivitas ekonomi, konektivitas wilayah dan pengembangan kawasan | 7.1.1.1. Pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi melalui pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur wilayah dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan serta kerawanan bencana. 7.1.1.2. Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, pengendalian dan pengamanan lalulintas dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan serta kerawanan bencana. |
| MISI 8: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. | | |
| Tujuan 8.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 8.1.1. Menurunnya kerusakan lingkungan | 8.1.1.1. Peningkatan indeks kualitas air melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah domestik, |

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|--------------------------------|---|---|
| | | penguatann fungsi pengawasan lingkungan; 8.1.1.2. Peningkatan luasan tutupan lahan melalui perluasan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. |
| 8.2. Menurunnya risiko bencana | 8.2.1. Meningkatnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana | 8.2.1.1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui Desa tangguh Bencana; 8.2.1.2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana melalui penguatan kelembagaan. |

6.2 Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan Kabupaten Pati 2017-2022

Berdasar analisis rangkaian tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022 untuk menjawab isu pembangunan strategis menuju pencapaian visi daerah, maka dirumuskan tema pembangunan selama lima tahun.



Penjelasan Tema dari tiap tahapan pembangunan sebagai berikut:

- Tahun 2017: tema pembangunan "Lokal Unggulan".
Perencanaan tahun 2017 untuk pelaksanaan tahun 2018 (paling tidak saat perubahan RKPD 2018). Fokus pembangunan pada pengoptimalan unggulan potensi lokal. Strategi yang diutamakan pada fasilitasi potensi lokal dan pengembangan sumber daya terampil berbasis Teknologi Informasi Komunikasi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- Tahun 2018: tema pembangunan "Lokal Berjejaring".
Perencanaan tahun 2018 untuk dijalankan tahun 2019. Tema ini melanjutkan capaian sebelumnya, berfokus pada eksplorasi pemberian nilai

tambah produk lokal dan pengembangan wilayah produktif berbasis Teknologi Informasi Komunikasi dengan memperhatikan pelestarian lingkungan. Jejaring kerjasama dengan dunia usaha, lembaga kelitbangan dan kerjasama antar daerah sangat perlu difokuskan pada periode ini.

c. Tahun 2019: tema pembangunan "Jejaring Berdaya Saing"

Perencanaan tahun 2019 untuk dilaksanakan tahun 2020. Fokusnya pada perluasan pasar pemasaran berbasis Teknologi Informasi Komunikasi dengan memperhatikan pelestarian lingkungan. Perlu difokuskan kerjasama asosiasi bisnis, dan event-event nasional/ internasional dapat diselenggarakan di Kabupaten Pati supaya memberi dampak pada aliran dana masuk (*Capital inflow*) dan mitra pasar.

d. Tahun 2020: tema pembangunan "Merata Bersama"

Tahun perencanaan 2020 untuk dilaksanakan tahun 2021 fokus pada pemerataan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah atau antar kelompok pendapatan. Setelah setengah perjalanan perencanaan perlu dievaluasi bagian-bagian yang tertinggal untuk diupayakan pemenuhannya atau mempersempit perbedaan yang tertinggal. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi untuk mempersempit kesenjangan antarwilayah dengan memperhatikan pelestarian lingkungan.

e. Tahun 2021 tema "Pasar Dunia"

Perencanaan tahun 2021 untuk dieksekusi tahun 2022 fokus pada perluasan pemasaran internasional atau ekspor. Barang atau jasa keahlian penduduk yang berkualitas, berbasis Teknologi Informasi Komunikasi dengan memperhatikan pelestarian lingkungan.

f. Tahun 2022 dengan tema "Selamat Sejahtera"

Perencanaan tahun 2022 untuk dieksekusi 2023 menjadi penutup akhir masa jabatan kepala daerah, memantapkan capaian yang telah sukses dan menambahkan hal yang harus dikejar atau dipertahankan pada derajat kinerja tertentu. Salah satu fokus periode ini juga persoalan lingkungan hidup yang berdampak pada keamanan dan keselamatan generasi yang akan datang.

Tabel VI.2.
Arah Kebijakan Pembangunan

| Tema Pembangunan Kabupaten Pati | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tema 2017: "Lokal Unggulan" - Pengembangan Layanan Dasar dan Perekonomian wirausaha Berbasis Karakter unggul Budaya Lokal | | | | | | | |
| Tema 2018: "Lokal Berjejaring" - | | | | | | | |
| a. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dan Pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, perumahan) | | | | | | | |
| b. serta Mengembangkan Jejaring Perdagangan, Pariwisata, dan Budaya untuk Meningkatkan Produktivitas Daerah | | | | | | | |
| c. berbasis Teknologi Informasi Komunikasi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan | | | | | | | |
| Tema 2019: "Jejaring Berdaya Saing" - Pengembangan Daya Saing Daerah Didukung Kemandirian Masyarakat Berbasis Keunggulan Lokal berbasis Teknologi Informasi Komunikasi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan | | | | | | | |
| Tema 2020: "Merata Bersama" - Pemerataan Pembangunan Antarwilayah Menuju Pembangunan yang Inklusif, memenuhi pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, perumahan) dengan menjaga Lingkungan Berkelanjutan | | | | | | | |
| Tema 2021: "Pasar Dunia" - Kemitraan Dunia Usaha untuk Memperluas Jaringan Pemasaran Produk Lokal berbasis Teknologi Informasi Komunikasi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan | | | | | | | |
| Tema 2022: " Selamat Sejahtera" - Pemantapan Kualitas Pembangunan Kesejahteraan | | | | | | | |
| Misi | Arah Kebijakan RPJMD Kab. Pati 2017-2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| Misi | Arah Kebijakan RPJMD Kab. Pati 2017-2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|---|------|------|------|------|------|------|
| MISI 1 | 1.1.Pendidikan Karakter masyarakat untuk mengenali & melestarikan warisan budaya, serta bertindak menurut nilai-nilai keunggulannya | | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 1.2. Meningkatnya pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai-nilai budaya | | √ | √ | √ | √ | √ |
| MISI 2. | 2.1.Kemitraan Pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk pembangunan kesehatan masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 2.2. Kemitraan Pemerintah, dunia usaha, masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan inklusif | | √ | √ | √ | | |
| | 2.3. Kemitraan Pemerintah, dunia usaha, masyarakat untuk pengarusutamaan gender di semua bidang kehidupan | | √ | √ | √ | | |
| MISI 3. | 3.1. Kemitraan Pemerintah, dunia usaha, masyarakat untuk memperkuat daya saing tenaga kerja serta relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan | | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 3.2. Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar | √ | √ | | √ | | |
| | 3.3. Meningkatkan keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menyeluruh pada setiap aspek penghidupan. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| MISI 4 | 4.1. Reformasi Birokrasi untuk pelayanan yang akuntabel dan ASN berintegritas | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 4.2.Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| MISI 5. | 5.1.Kemitraan Pemerintah, dunia usaha, masyarakat untuk penambahan penyerapan tenaga kerja dan lapangan usaha | | √ | √ | √ | | √ |
| MISI 6. | 6.1.Kemitraan pemerintah, dunia usaha, masyarakat untuk pengembangan investasi dan inovasi produktivitas sektor pertanian, perdagangan dan industri | | | √ | √ | √ | √ |
| | 6.2.Meningkatkan kondusivitas iklim usaha | | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 6.3. Peningkatan produksi dan keadilan distribusi pangan | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 6.4. Pembangunan dan penguatan kelembagaan pariwisata | | √ | √ | √ | √ | √ |
| Misi 7 | 7.1. Pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang dalam kondisi memadai | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| MISI 8 | 8.1.Kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan risiko bencana | | √ | √ | √ | √ | √ |

6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018,

Kabupaten Pati masuk dalam wilayah pengembangan Wanarakuti (Juwana-Jepara-Kudus-Pati) yang meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati. Wilayah ini diarahkan sebagai PKW dan PKL dengan simpul utama berada di kawasan perkotaan Kudus, didukung oleh perkotaan Jepara, Pecangaan, Tayu Pati dan Juwana. Potensi regional yang dimiliki adalah potensi : (i) primer berupa perikanan; (ii) sekunder meliputi furniture, pengolahan tembakau, pengolahan ikan; dan (iii) tersier berupa pariwisata. Khusus untuk Kabupaten Pati, potensi unggulan yang dikembangkan adalah industri tapioka, batik dan kuningan; Minapolitan TPI Bajomulyo I dan Bajomulyo II di Kecamatan Juwana, dengan komoditas unggulan cumi, kakap merah dan pindang; Agropolitan dengan komoditas jeruk pamelon dan kelapa kopyor. Adapun arah pengembangan klaster di Kabupaten Pati meliputi klaster tapioka, pengolahan hasil laut, kerajinan kuningan, konveksi, buah-buahan, budidaya bandeng air tawar, kopi, sutera alam, makanan ringan, batik tulis bakaran, handycraft, dan kapuk. Sementara itu untuk destinasi wisata yang dikembangkan adalah destinasi wisata Waduk Gunungrowo, Kebon Kopi Jolong, Goa Pancur dan Wareh.

Secara khusus, sasaran yang diharapkan dapat dicapai Kabupaten Pati terkait pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan TPT tahun 2017-2018 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel VI.3
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, dan TPT
Kabupaten Pati Tahun 2017-2018

| No | Indikator | 2017 | 2018 |
|----|---------------------|-------------|-------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,50 – 5,90 | 5,90 – 6,30 |
| 2 | Angka Kemiskinan | 8,98 | 7,99 |
| 3 | TPT | 7,44 | 7,27 |

Sumber: Perubahan RPJMD Jawa Tengah 2013-2018

Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah Wanarakuti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan konsep pengembangan wilayah Wanarakuti adalah Pengembangan Wilayah Wanarakuti yang Lestari Berbasis Industri, Pariwisata, dan Agrominapolitan. Potensi industri pengolahan yang berada di Kudus dan Pati dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi wilayah dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sedangkan pariwisata yang ada di Kudus maupun Jepara, dimana saat ini Jepara sebagai destinasi wisata nasional bahkan akan bertaraf internasional. Agrominapolitan merupakan konsep penggabungan antara potensi perikanan yang ada disepanjang pesisir Wanarakuti terutama di wilayah Pati bagian utara dan pertanian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bahan pokok industri pengolahan, pertanian ini berada di Jepara dan Pati bagian selatan.

Guna mendukung konsep tersebut maka arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Wanarakuti sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.4
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Wanarakuti

| Konsep Pengembangan | Aspek | Kebijakan | Strategi |
|---|---------|--|---|
| Pengembangan Wilayah Wanarakuti yang Berbasis Industri pariwisata dan Agrominapolitan | Ekonomi | Kebijakan yang mengatur koordinasi lintas sektor percepatan pembangunan ekonomi; | Mengembangkan industri pengolahan dengan sistem hulu hilir dengan pengoptimalan |

| Konsep Pengembangan | Aspek | Kebijakan | Strategi |
|---------------------|--|---|--|
| | | | <p>potensi lokal (pertanian, perikanan)</p> <p>Memanfaatkan jalur pantura sebagai embrio pertumbuhan wilayah dan kegiatan ekonomi</p> <p>Melengkapi kebutuhan sarana pendukung pariwisata</p> |
| | | <p>Program Pengembangan perekonomian lokal yang fokus pada sektor unggulan;</p> | <p>Mengembangkan sektor UMKM, dan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan untuk mendukung sektor pariwisata;</p> <p>Meningkatkan potensi pertanian dan perikanan</p> |
| | | <p>Pengembangan wilayah yang diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya di setiap wilayah, serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan</p> | <p>Memeratakan pertumbuhan wilayah dengan mengoptimalkan potensi pariwisata, pertanian, perikanan dan sektor UMKM</p> <p>Meningkatkan pertumbuhan PDRB melalui pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata</p> |
| | <p>Fisik (Infrastruktur, Konektivitas, Alam)</p> | <p>Program Peningkatan konektivitas, sarana dan prasarana pendukung ekonomi antara wilayah perdesaan dan perkotaan</p> | <p>Merencanakan pembangunan sarana prasarana penunjang kawasan industri pengolahan dan penunjang pariwisata;</p> <p>Membangun sarana dan prasarana dasar di seluruh desa dengan kualitas yang sama dipertanian;</p> <p>Meningkatkan sarana penghubung antara selatan dan utara Kabupaten Pati dengan</p> |

| Konsep Pengembangan | Aspek | Kebijakan | Strategi |
|---------------------|--|---|--|
| | | | peningkatan infrastruktur jalan dan sarana transportasi umum; |
| | | | Mengurangi dampak banjir dan longsor pada kawasan budidaya |
| | | | Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian |
| | Sosial | Program Peningkatan kapasitas SDM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; pengembangan keahlian dan keterampilan teknis dan peningkatan penerapan manajemen modern. | Mengoptimalkan sumber daya manusia dan tenaga kerja untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat |
| | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan di seluruh wilayah Wanarakuti | | |
| | Lingkungan Hidup | Terwujudnya wilayah Wanarakuti yang ramah lingkungan dan berkelanjutan | Menjaga kondisi dan fungsi kawasan hulu (Muria) dan kawasan Kars (Kendeng, Sukolilo) sebagai kawasan lindung |
| | | | Menertibkan pembangunan tidak berijin pada kawasan lindung |
| | | | Menjaga kelestarian wilayah pesisir sebagai daerah lindung luapan air laut |
| | | | Menertibkan penambangan liar |
| | | | Menjaga kelestarian DAS |
| Tata Kelola | Program peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja melalui tata laksana organisasi yang baik (good governance); | Membentuk badan yang mengatur dan mensinkronkan rencana daerah di wilayah Wanarakuti | |

Sumber: Perubahan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Strategi dan arah kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Pati memperhatikan arah pengembangan wilayah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Pati merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Untuk mencapai

perencanaan yang komprehensif maka strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat.

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan paradigma yang berkembang dalam penataan ruang, wilayah Kabupaten Pati akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu.

a. Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Pati sesuai SWP

Kabupaten Pati merupakan wilayah Pantai Utara Jawa yang mengalami perkembangan pesat akibat dukungan Jalan Arteri Primer Lintas Pantura. Kegiatan yang akan berkembang di kabupaten seiring dengan peran Jalan Pantura sebagai penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa adalah perdagangan-jasa, pusat jasa pemasaran, industri, dan pergudangan. Selain itu di wilayah Kabupaten Pati telah berkembang ekonomi lokal seperti: pertanian, perikanan, industri kecil kuningan, tapioka, dan lain-lain. Potensi lokal dan potensi dukungan akses regional diharapkan akan mendorong terwujudnya hubungan ekonomi produksi dan distribusi yang saling menguntungkan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Pati adalah terwujudnya **Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani**, berbasis keunggulan pertanian dan industri yang berkelanjutan. Secara umum strategi pengembangan kawasan berfungsi lindung adalah pemeliharaan, pemulihan, dan pengkayaan. Cakupan kawasan lindung untuk fungsi perlindungan wilayah bawahnya, perlindungan wilayah setempat, perlindungan wilayah rawan bencana alam, serta kawasan suaka cagar alam dan cagar budaya, harus jelas dalam alokasi dan fungsinya.

Melalui mempertimbangkan potensi sektor unggulan di 10 kecamatan, pengembangan wilayah di Kabupaten Pati selama kurun waktu 2017-2022 akan dilakukan melalui intervensi terhadap 6 bagian wilayah kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW, yaitu Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I, II, III, IV, V, dan VI sebagai berikut:

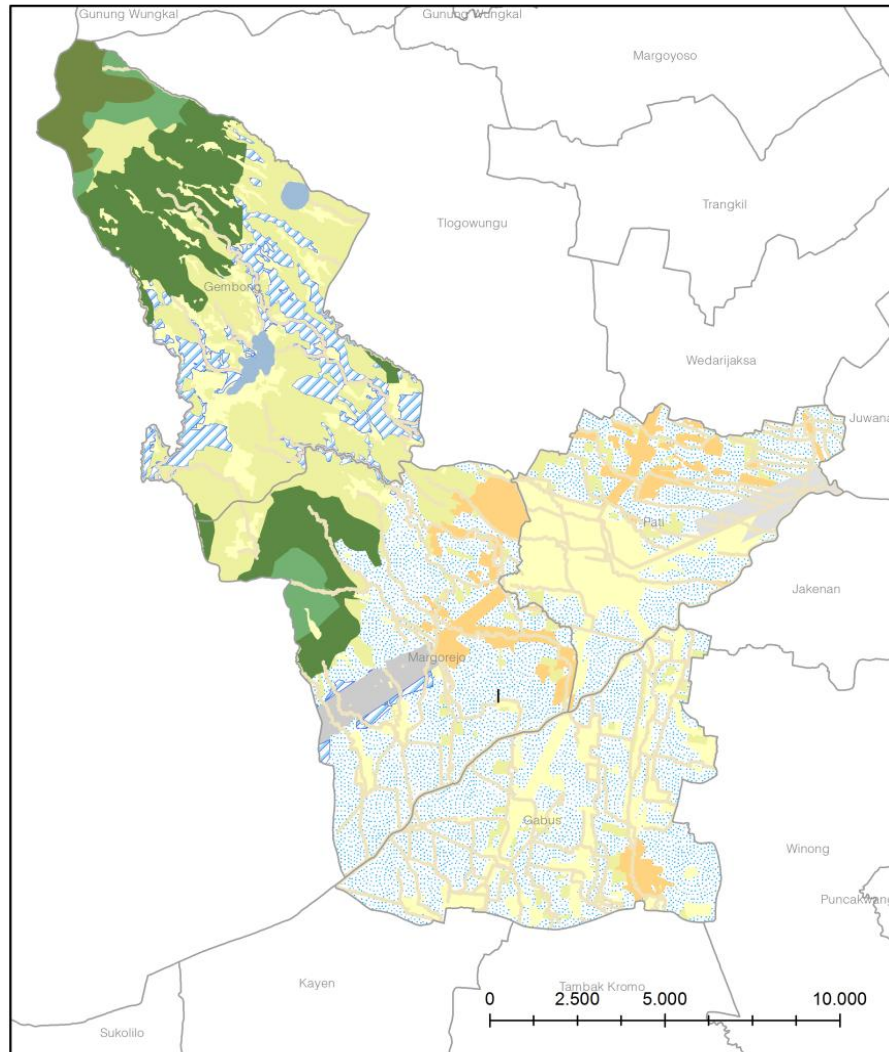
1) SWP Kawasan I

Kawasan SWP I dalam arahan penataan ruang Kabupaten Pati meliputi Kecamatan Pati, Margorejo, Gembong, dan Gabus. Kecamatan Pati telah berkembang pesat karena fungsinya sebagai ibukota Kabupaten Pati. Sedangkan wilayah Kecamatan Gembong dan Kecamatan Gabus merupakan kawasan yang didominasi fungsi kegiatannya adalah pertanian, yang terpengaruh perkembangan wilayah perkotaan Kecamatan Pati. Kawasan SWP I diperuntukkan sebagai kawasan ibukota kabupaten yang memiliki fungsi pokok sebagai kawasan untuk pusat pemerintahan skala kabupaten. Pada wilayah SWP I Kabupaten Pati terdapat perkembangan kawasan perkotaan (*urban*) yang memiliki potensi besar pada sektor listrik, gas dan air bersih, industri pengolahan, keuangan, pengangkutan jasa-jasa dan komunikasi, sedangkan untuk kawasan *hinterland* yang meliputi dua kecamatan lainnya cocok dikembangkan sebagai fungsi-fungsi pertanian (dalam arti luas) sebagai pendukung Kota Pati. Berikut merupakan data penggunaan lahan pada Kawasan SWP I Kabupaten Pati (Tabel VI.7):

Tabel VI.5
Penggunaan Lahan Satuan Wilayah Pembangunan I

| Penggunaan Lahan (Ha) | Kecamatan | | | | Total Luas Guna Lahan SWP I (Ha) | Persentase Guna Lahan |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|--------|----------------------------------|-----------------------|
| | Pati | Margorejo | Gembong | Gabus | | |
| Permukiman Perkotaan | 1070,3 | 594,7 | 0 | 112,1 | 1777,1 | 7,13 |
| Permukiman Perdesaan | 354,1 | 260,3 | 876,6 | 916,0 | 2407 | 9,65 |
| Industri | 200,3 | 306,4 | 0 | 0 | 506,7 | 2,03 |
| Sawah Irigasi | 1758,7 | 2768,2 | 0 | 2995,7 | 7522,6 | 30,16 |
| Tegalan | 180,4 | 922,8 | 2564,7 | 208,3 | 3876,2 | 15,54 |
| Sempadan Sungai | 963,031 | 992,5 | 505,4 | 1057,6 | 3518,5 | 14,11 |
| Hutan Produksi | 0 | 828,9 | 1516,6 | 0 | 2345,5 | 9,40 |
| Hutan Lindung | 0 | 0 | 1281,74 | 0 | 1281,7 | 5,14 |
| Hutan Produksi Terbatas | 0 | 258,9 | 276 | 0 | 534,9 | 2,14 |
| Sawah Tadah Hujan | 0 | 97,3 | 1072,8 | 0 | 1170,1 | 4,69 |

Berdasarkan arahan tata ruang dan penggunaan lahan dalam konstelasi RTRW Kabupaten Pati, SWP I Kabupaten Pati yang terdiri dari Kecamatan Pati, Margorejo, Gembong, dan Gabus dapat diketahui didominasi oleh lahan tidak terbangun. Penggunaan lahan tidak terbangun terbesar di SWP I berupa sawah irigasi sebesar 7.522,6 hektar, diikuti dengan guna lahan tegalan sebesar 3.876,2 hektar, dan wilayah yang diperuntukkan sebagai sempadan sungai sebesar 3.518,5 hektar. Meski demikian, terdapat signifikansi peruntukan lahan terbangun (*built-up area*) yang cukup besar pada SWP I ini. Proporsi lahan terbangun terbesar adalah penggunaan permukiman perdesaan dengan luas area sebesar 2.407 hektar. Proporsi lahan terbangun terbesar kedua adalah permukiman perkotaan dengan peruntukan lahan sebesar 1.777,1 hektar. Terdapat pula peruntukan industri dengan luas 506,7 hektar. Selain itu, terdapat lahan tidak terbangun (*nonbuilt-up area*) yang diperuntukkan untuk kegunaan budidaya, seperti hutan produksi seluas 2.345,5 hektar dan sawah tadah hujan sebesar 1.170,1 hektar. Kawasan lindung juga terdapat pada SWP I Kabupaten Pati berupa lahan peruntukan hutan lindung dengan luas area sebesar 1281,7 hektar. Berikut merupakan Peta SWP I Kabupaten Pati (Gambar VI.3):



LEGENDA

| | | |
|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Batas Kecamatan | Permukiman Perdesaan | Sempadan Pantai |
| Danau | Permukiman Perkotaan | Hutan Produksi |
| Industri | Pertanian Hortikultura | Pertanian Lahan Basah |
| Perikanan | Sempadan Sungai | |

Sumber: Olah Data RTRW Kab. Pati 2010-2030.

Gambar VI.3
Satuan Wilayah Pembangunan I (SWP I)

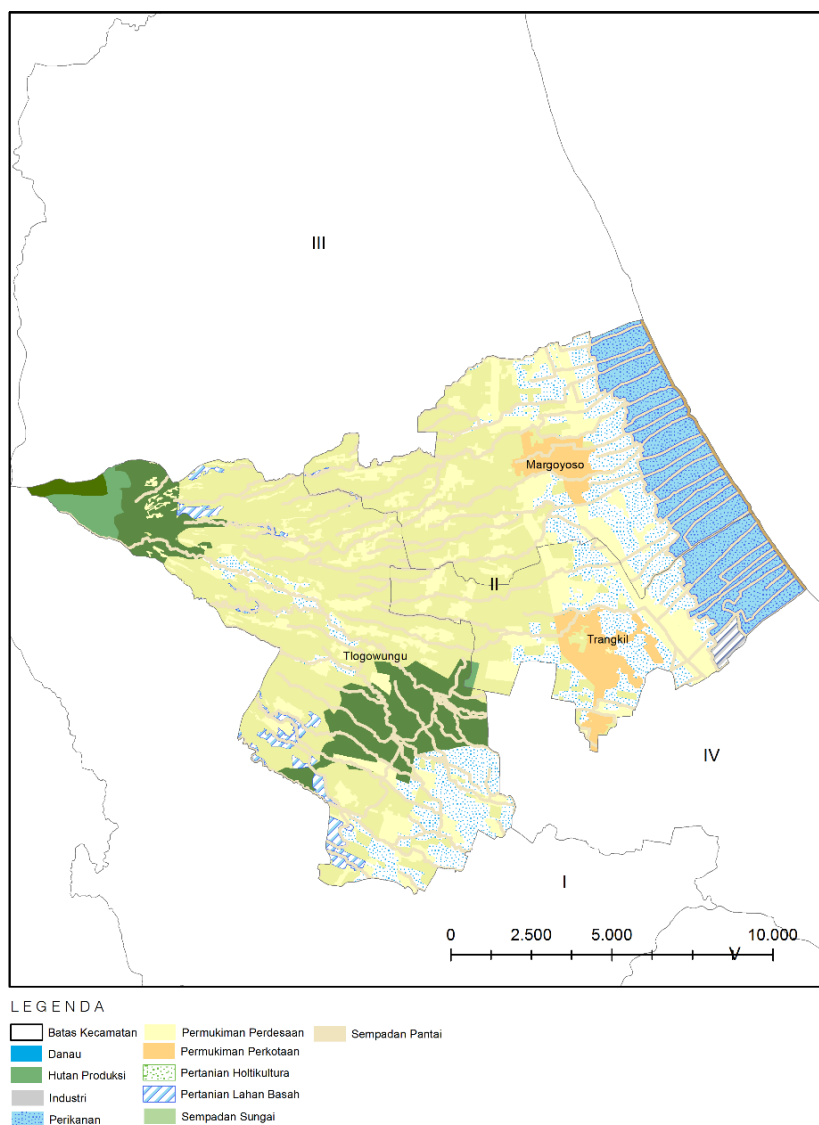
2) SWP Kawasan II

Kawasan SWP II dalam rencana penataan ruang Kabupaten Pati meliputi wilayah administratif Kecamatan Tlogowungu, Trangkil, dan Margoyoso, dengan pusat pelayanan berada di Kecamatan Margoyoso. Secara pengamatan tata ruang, Kawasan SWP II merupakan kawasan yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pusat pengembangan baru yang strategis diantara segitiga kawasan pertumbuhan cepat di Kabupaten Pati bagian Utara, yaitu Pati, Juwana, dan Tayu, juga dilalui oleh "jalur pengembangan pesisir" utara Jawa Tengah dalam kawasan WANARAKUTI. Berikut merupakan data penggunaan lahan di wilayah ini.

Tabel VI.6
Penggunaan Lahan Satuan Wilayah Pembangunan II

| Penggunaan Lahan (Ha) | Kecamatan | | | Total Luas Guna Lahan SWP II (Ha) | Persentase Guna Lahan |
|--------------------------|------------|----------|-----------|--|-----------------------------|
| | Tlogowungu | Trangkil | Margoyoso | | |
| Permukiman Perkotaan | 0 | 443,2 | 257,3 | 700,5 | 3,95 |
| Permukiman Perdesaan | 982,7 | 679,7 | 972,9 | 2635,3 | 14,84 |
| Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sawah Irigasi | 905,4 | 800,3 | 1030,7 | 2736,4 | 15,41 |
| Tegalan | 3403,2 | 915,9 | 1775 | 6094,1 | 34,33 |
| Sempadan Sungai | 1462 | 637,5 | 1223,3 | 3322,8 | 18,72 |
| Hutan Produksi | 1454,4 | 19,4 | 0 | 1473,8 | 8,30 |
| Hutan Lindung | 104,8 | 0 | 0 | 104,8 | 0,59 |
| Hutan Produksi Terbatas | 245,2 | 0 | 0 | 245,2 | 1,38 |
| Sawah Tadah Hujan | 255,5 | 0 | 2,9 | 258,4 | 1,46 |
| Sempadan Pantai | 0 | 29 | 70,2 | 99,2 | 0,56 |
| Penggaraman | 0 | 82,9 | 0 | 82,9 | 0,47 |

SWP II Kabupaten Pati terdiri dari tiga kecamatan; yakni Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Trangkil, dan Margoyoso. Penggunaan lahan terbesar pada SWP II adalah lahan tidak terbangun yang berupa tegalan seluas 6.094,1 hektar dengan persentase mencapai 34,33%. Penggunaan lahan terbesar kedua dengan persentase 18,72% adalah sempadan sungai sebesar 3.322,8 hektar. Peruntukan lahan terbangun (*built-up area*) sebagai permukiman diarahkan ke permukiman perdesaan seluas 2.635,3 hektar atau 14,84% dari total keseluruhan. Lahan terbangun selanjutnya adalah permukiman perkotaan dengan peruntukan lahan sebesar 700,5 hektar. Permukiman perkotaan merupakan peruntukan lahan terbangun terbesar kedua. Pada SWP II Kabupaten Pati tidak terdapat peruntukan lahan sebagai industri. Sesuai dengan arahan tata ruang dan penggunaan lahan dalam konstelasi RTRW Kabupaten Pati, SWP II Kabupaten Pati terdapat peruntukan lahan yang tidak terbangun (*non-built up area*) untuk kegiatan budidaya. Terdapat sawah irigasi dengan persentase peruntukan lahan cukup besar, yakni 15,41% atau seluas 2.736,4 hektar. Peruntukan kegiatan budidaya lainnya adalah hutan produksi sebesar 1.473,8 hektar dengan persentase 8,3%. Di samping itu, pada SWP II Kabupaten Pati juga terdapat penggunaan lahan yang diperuntukkan sebagai area Penggaraman dengan luas sebesar 82,9 hektar atau 0,47% dari total keseluruhan peruntukan lahan. Berdasarkan keadaan eksistingnya, SWP II memiliki banyak potensi terutama pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Berikut merupakan rencana pengembangan SWP II Kabupaten Pati dalam konteks keruangan:



Sumber: Olah Data RTRW Kab. Pati 2010-2030.

Gambar VI.4
Satuan Wilayah Pembangunan II (SWP II)

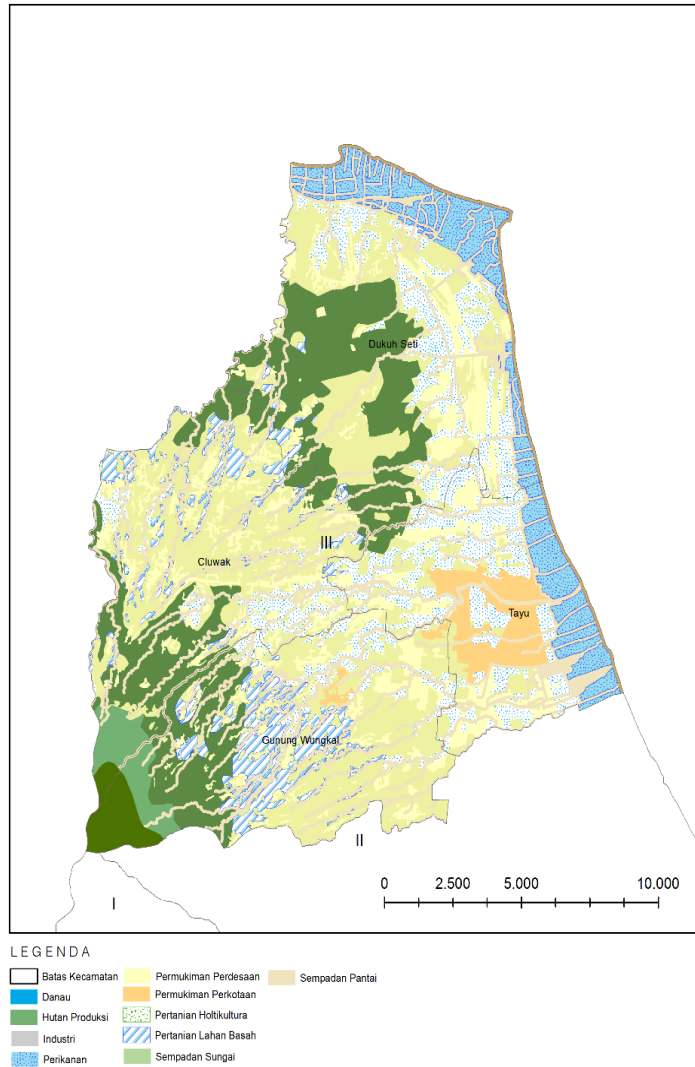
3) SWP Kawasan III

Wilayah Kawasan SWP III Kabupaten Pati meliputi empat kecamatan; Cluwak, Dukuhseti, Gunungwungkal, dan Tayu. Kawasan SWP III adalah kawasan kombinasi antara kawasan pesisir dan kawasan pegunungan Muria dengan karakteristik alam yang berbeda dan membutuhkan pendekatan pembangunan yang terpadu antara kawasan pegunungan, daratan, dan pesisir. Seperti halnya SWP II, kawasan ini juga merupakan kawasan pertumbuhan cepat yang disebabkan karena dilalui “jalur pengembangan pesisir” utara Jawa Tengah dalam kawasan WANARAKUTI. Poros utama perkembangannya adalah kegiatan perkotaan di Kota Tayu, kegiatan perikanan di pesisir Kecamatan Dukuhseti, dan pertanian di Kecamatan Gunungwungkal dan Cluwak. Berikut merupakan tabel penggunaan lahan di SWP III Kabupaten Pati.

Tabel VI.7
Penggunaan Lahan Satuan Wilayah Pembangunan III

| Penggunaan Lahan (Ha) | Kecamatan | | | | Total Luas Guna Lahan SWP III (Ha) | Persentase Guna Lahan |
|-------------------------|-----------|------------|---------------|--------|------------------------------------|-----------------------|
| | Cluwak | Dukuh Seti | Gunungwungkal | Tayu | | |
| Permukiman Perkotaan | 0 | 0 | 74,2 | 773,7 | 847,9 | 3,07 |
| Permukiman Perdesaan | 945,4 | 989,3 | 709,6 | 586,8 | 3231,1 | 11,68 |
| Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Sawah Irigasi | 447,7 | 1260,7 | 418,2 | 1376,4 | 3503 | 12,67 |
| Tegalan | 2481,2 | 2004,1 | 2171,8 | 577,6 | 7234,7 | 26,16 |
| Sempadan Sungai | 1268,9 | 1374,4 | 1233,5 | 1017,8 | 4894,6 | 17,70 |
| Hutan Produksi | 1331,3 | 2357,1 | 948,5 | 60 | 4696,9 | 16,99 |
| Hutan Lindung | 68,4 | 0 | 384,79 | 0 | 453,19 | 1,64 |
| Hutan Produksi Terbatas | 268,5 | 0 | 243 | 0 | 511,5 | 1,85 |
| Sawah Tadah Hujan | 518,9 | 82,5 | 866,1 | 17,8 | 1485,3 | 5,37 |
| Sempadan Pantai | 0 | 0 | 0 | 75,7 | 75,7 | 0,27 |
| Penggaraman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Tambak | 0 | 0 | 0 | 719 | 719 | 2,60 |

Dominasi penggunaan lahan pada SWP III Kabupaten Pati adalah lahan tidak terbangun (*nonbuilt-up area*). Pada SWP III Kabupaten Pati yang terdiri dari Kecamatan Cluwak, Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Tayu, penggunaan lahan terbesar diperuntukkan sebagai tegalan dengan luas 7.234,7 hektar yakni 26,16% dari penggunaan lahan seluruhnya. Penggunaan lahan terbesar selanjutnya adalah sempadan sungai seluas 4.894,6 hektar dan hutan produksi seluas 4.696,9 hektar. Selain itu, untuk kegiatan budidaya pada SWP III Kabupaten Pati juga terdapat penggunaan lahan sebagai sawah tadah hujan seluas 1.485,3 hektar serta tambak dengan luas area 719 hektar. Adapun penggunaan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan terbangun (*built-up area*) terdapat dua jenis, yakni permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Tidak ada penggunaan lahan sebagai peruntukan industri pada SWP III Kabupaten Pati. Seluas 3.231,1 hektar penggunaan lahan diperuntukkan sebagai permukiman perdesaan, sedangkan penggunaan lahan untuk permukiman perkotaan seluas 847,9 hektar. Berdasarkan kondisi eksistingnya, Kawasan SWP III memiliki potensi pengembangan perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, transportasi dan agro-industri. Berikut merupakan rencana pengembangan SWP III Kabupaten Pati dalam konteks keruangan



Sumber: Olah Data RTRW Kab. Pati 2010-2030.

Gambar VI.5
Satuan Wilayah Pembangunan III (SWP III)

4) SWP Kawasan IV

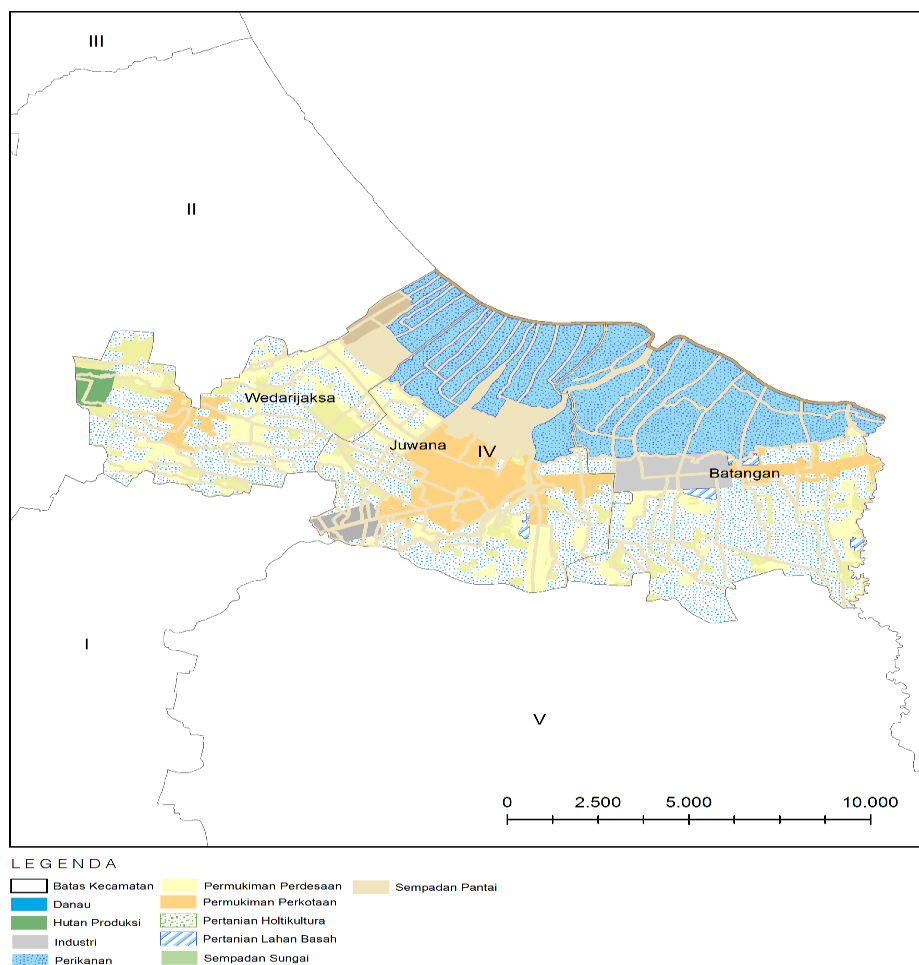
Wilayah Kawasan SWP IV dalam rencana tata ruang Kabupaten Pati meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Wedarijaksa, Juwana, dan Kecamatan Batangan. Kawasan SWP IV merupakan kawasan pertumbuhan cepat, karena selain letaknya yang strategis dilalui jalur arteri primer (jalan pantura), kawasan ini juga dilalui dan “jalur pengembangan pesisir” Utara Jawa Tengah dalam kawasan WANARAKUTI. Sektor perekonomian yang berkembang di kawasan ini merupakan sektor perekonomian andalan di Kabupaten Pati yaitu perikanan laut dan industri. Berikut merupakan tabel penggunaan lahan di Kawasan SWP IV Kabupaten Pati :

Tabel VI.8
Penggunaan Lahan Satuan Wilayah Pembangunan IV

| Penggunaan Lahan (Ha) | Kecamatan | | | Total Luas Guna Lahan SWP IV (Ha) | Persentase Guna Lahan |
|-----------------------|-------------|--------|----------|-----------------------------------|-----------------------|
| | Wedarijaksa | Juwana | Batangan | | |
| Permukiman Perkotaan | 167,2 | 842,9 | 220,9 | 1231 | 4,20 |

| Penggunaan Lahan (Ha) | Kecamatan | | | Total Luas Guna Lahan SWP IV (Ha) | Persentase Guna Lahan |
|-------------------------|-------------|--------|----------|-----------------------------------|-----------------------|
| | Wedarijaksa | Juwana | Batangan | | |
| Permukiman Perdesaan | 575,5 | 410,7 | 329,3 | 1315,5 | 4,49 |
| Industri | 0 | 101,8 | 317,8 | 419,6 | 1,43 |
| Sawah Irigasi | 14544,6 | 1247,6 | 2019 | 17811,2 | 60,74 |
| Tegalan | 408 | 189,6 | 210 | 807,6 | 2,75 |
| Sempadan Sungai | 983,1 | 1716,6 | 1077,4 | 3777,1 | 12,88 |
| Hutan Produksi | 92,9 | 0 | 0 | 92,9 | 0,32 |
| Hutan Lindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Hutan Produksi Terbatas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Sawah Tadah Hujan | 0 | 16,5 | 55,7 | 72,2 | 0,25 |
| Sempadan Pantai | 17,7 | 35,7 | 96,2 | 149,6 | 0,51 |
| Penggaraman | 106,5 | 0 | 0 | 106,5 | 0,36 |
| Tambak | 279 | 1258,2 | 2003,1 | 3540,3 | 12,07 |

Berdasarkan arahan tata ruang dan penggunaan lahan dalam konstelasi RTRW Kabupaten Pati, SWP IV Kabupaten Pati yang terdiri dari Kecamatan Wedarijaksa, Juwana, dan Batangan dapat diketahui bahwa penggunaan lahan didominasi oleh lahan tidak terbangun. Lebih dari setengah penggunaan lahan merupakan sawah irigasi sebesar 17811,2 hektar atau 60,74% dari keseluruhan penggunaan lahan di SWP IV Kabupaten Pati. Penggunaan lahan terbesar selanjutnya diperuntukkan sebagai sempadan sungai dengan luas 3777,1 hektar atau 12,88 % diikuti dengan guna lahan tambak sebesar 3.540,3 hektar atau 12,07 %. Proporsi lahan terbangun (*built-up area*) tidak cukup besar pada SWP IV Kabupaten Pati ini. Penggunaan lahan sebagai permukiman perdesaan sebesar 1.315,5 hektar, adapun permukiman perkotaan sebesar 1231 hektar atau 4,2 %. Terdapat pula peruntukan industri dengan luas 419,6 hektar. Selain itu, terdapat lahan tidak terbangun (*non-built up area*) berupa sempadan pantai seluas 149, hektar. Guna lahan tidak terbangun juga ada yang diperuntukkan untuk kegunaan budidaya, seperti hutan produksi seluas 92,9 hektar dan sawah tadah hujan sebesar 72,2 hektar. Pada SWP IV Kabupaten Pati tidak terdapat peruntukan lahan sebagai hutan produksi terbatas dan hutan lindung. Berdasarkan kondisi eksistingnya, kawasan SWP IV memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan dengan fungsi utama perdagangan, transportasi laut (pelabuhan), perikanan, industri, dan pertanian. Berikut merupakan rencana pengembangan SWP IV Kabupaten Pati dalam konteks keruangan



Sumber: Olah Data RTRW Kab. Pati 2010-2030.

Gambar VI.6
Satuan Wilayah Pembangunan IV (SWP IV)

5) SWP Kawasan V

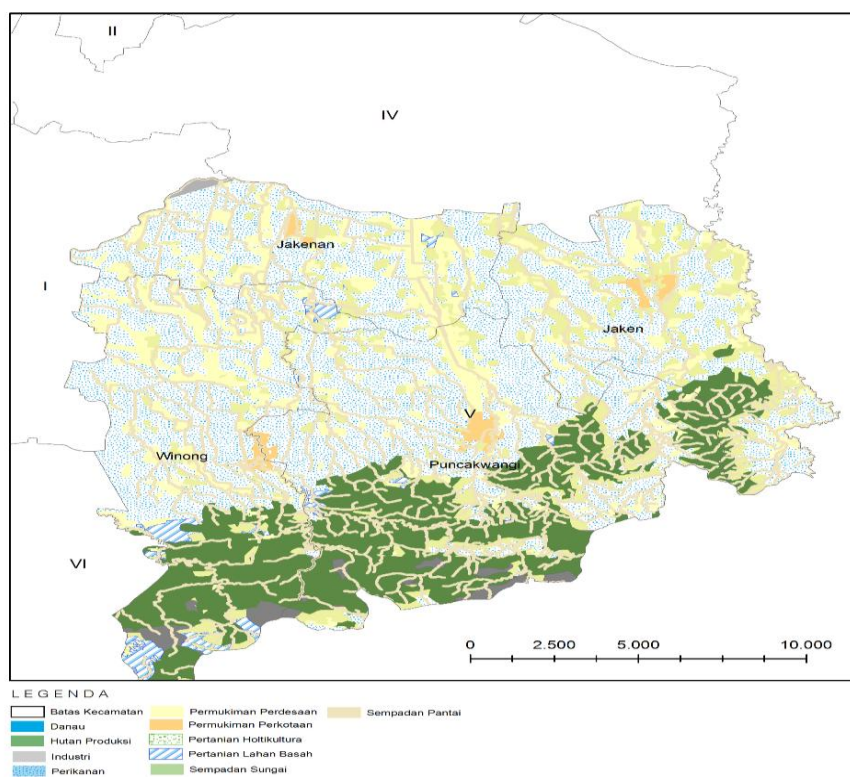
Wilayah Kawasan SWP V dalam arahan tata ruang Kabupaten Pati meliputi wilayah administratif Kecamatan Puncakwangi, Winong, Jaken, dan Jakenan. Pusat pelayanannya berada pada Kecamatan Jakenan. Kawasan SWP V merupakan kawasan yang diharapkan mampu menjadi pusat perkembangan baru di kawasan pegunungan Kendeng bagian Tenggara dan Selatan. Dengan masuknya Kota Jakenan diantara kelima kota yang diharapkan mampu menjadi motor pembangunan di Kabupaten Pati dengan konsep JAKATINATA (Jakenan, Kayen, Pati, Juwana, dan Tayu). Berikut merupakan tabel penggunaan lahan di wilayah Kawasan SWP V:

Tabel VI.9
Penggunaan Lahan Satuan Wilayah Pembangunan V

| Penggunaan Lahan (Ha) | Kecamatan | | | | Total Luas Guna Lahan SWP V (Ha) | Persentase Guna Lahan |
|-----------------------|--------------|--------|--------|---------|----------------------------------|-----------------------|
| | Puncak wangi | Winong | Jaken | Jakenan | | |
| Permukiman Perkotaan | 138,9 | 32,5 | 86 | 30,4 | 287,8 | 0,85 |
| Permukiman Perdesaan | 740,8 | 1151,8 | 676,3 | 993,1 | 3562 | 10,46 |
| Industri | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0,14 |
| Sawah Irigasi | 4127,1 | 3566,4 | 3171,6 | 2875,8 | 13740,9 | 40,35 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Tegalan | 831,6 | 544 | 1245,4 | 551,9 | 3172,9 | 9,32 |
| Sempadan Sungai | 2871,3 | 1812,7 | 1102,5 | 850,2 | 6636,7 | 19,49 |
| Hutan Produksi | 3396 | 1845,1 | 367 | 0 | 5608,1 | 16,47 |
| Hutan Lindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Hutan Produksi Terbatas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Sawah Tadah Hujan | 47,1 | 489,6 | 26,5 | 27,8 | 591 | 1,74 |
| Sempadan Pantai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Penggaraman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Karst Budidaya | 205,6 | 201,7 | 0 | 0 | 407,3 | 1,20 |
| Sempadan Danau | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 2,8 | 0,01 |

SWP V Kabupaten Pati terdiri dari empat kecamatan; yakni Kecamatan Puncakwangi, Winong, Jaken, dan Jakenan. Penggunaan lahan pada SWP V Kabupaten Pati cukup bervariasi. Penggunaan lahan terbesar pada SWP V Kabupaten Pati adalah lahan tidak terbangun berupa sawah irigasi seluas 13740,9 hektar dengan persentase mencapai 40,35%. Penggunaan lahan terbesar kedua diperuntukkan sebagai wilayah sempadan sungai seluas 6.636,7 hektar (19,49%), selanjutnya dengan persentase 16,47% adalah peruntukan lahan sebagai hutan produksi dengan luas 5.608,1 hektar. Peruntukan lahan terbangun (*built-up area*) pada SWP V Kabupaten Pati ini juga cukup besar. Penggunaan lahan yang diperuntukkan sebagai permukiman perdesaan seluas 3.562 hektar atau 10,46% dari total keseluruhan. Lahan terbangun selanjutnya adalah permukiman perkotaan dengan peruntukan lahan sebesar 287,8 hektar (0,85 %) serta terdapat peruntukan industri dengan luas area 48 hektar (0,14 %). Selain itu, SWP V Kabupaten Pati juga terdapat peruntukan lahan yang tidak terbangun (*non-built up area*) sebagai karst budidaya dengan luas area 407,3 hektar (1,20 %) dan sempadan danau dengan luasan area 2,8 hektar. Tidak terdapat penggunaan lahan yang diperuntukkan sebagai hutan lindung dan hutan produksi terbatas pada SWP V Kabupaten Pati. Berdasarkan kondisi eksistingnya, wilayah ini dapat dikembangkan dengan konsep pengembangan kota kecil yang masih mengandalkan sektor agraris yang berorientasi pada pertanian untuk bahan baku industri (industri pertanian/agroindustri). Potensi yang bisa dikembangkan pada kawasan ini adalah pada sektor pertambangan dan galian; pertanian lahan basah dan kering.



Sumber: Olah Data RTRW Kab. Pati 2010-2030.

Gambar VI.7
Satuan Wilayah Pembangunan V (SWP V)

6) SWP Kawasan VI

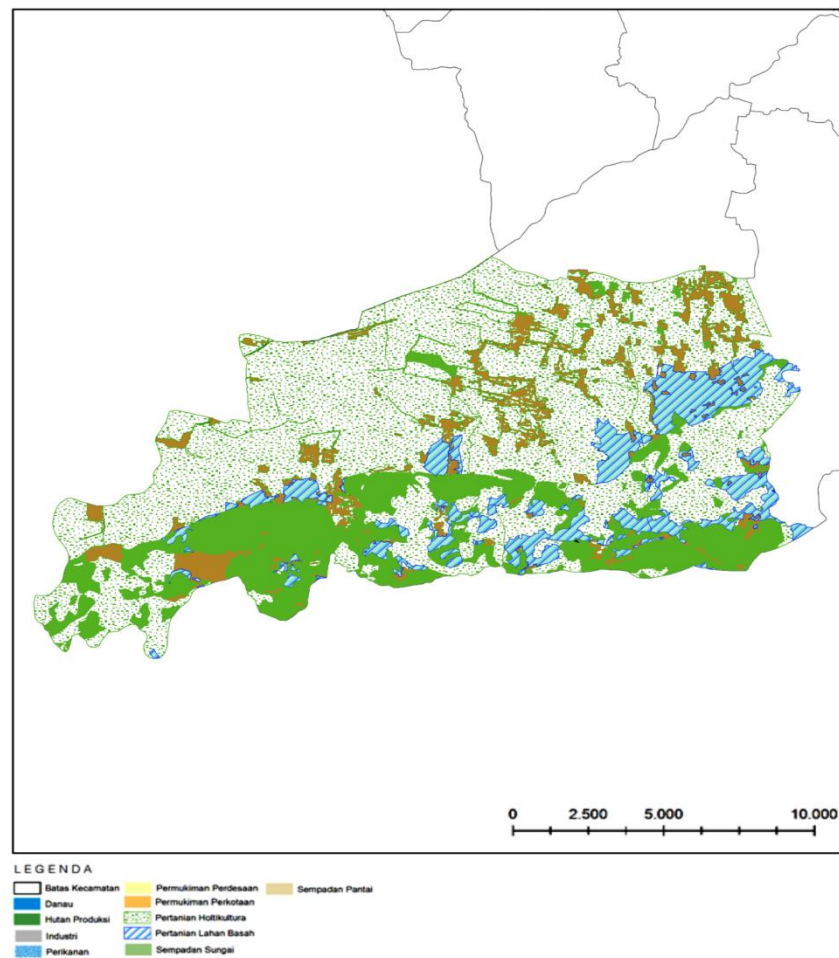
Kawasan SWP VI dalam arahan tata ruang Kabupaten Pati meliputi Kecamatan Tambakromo, Kayen, dan Sukolilo. Pusat pelayanannya diarahkan pada Kecamatan Kayen. Kawasan SWP VI merupakan bagian dari kawasan pegunungan Kendeng di kabupaten Pati bagian Selatan. Dengan karakteristik alamnya yang berupa pegunungan kapur dan kawasan yang berkembang secara linier di sepanjang jalan propinsi yang menghubungkan Kabupaten Pati dengan Kabupaten Grobogan yang merupakan jalur pengembangan kawasan selatan Pati. Ciri utama pada SWP VI adalah terbentuknya kota-kota kecil pada simpul-simpul yang dilalui jalan propinsi tersebut. Berikut merupakan tabel penggunaan lahan di Kawasan SWP VI Kabupaten Pati:

Tabel VI.10
Penggunaan Lahan Satuan Wilayah Pembangunan VI

| Penggunaan Lahan (Ha) | Kecamatan | | | Total Luas Guna Lahan SWP VI (Ha) | Persentase Guna Lahan |
|-----------------------|--------------|--------|----------|-----------------------------------|-----------------------|
| | Tambak Kromo | Kayen | Sukolilo | | |
| Permukiman Perkotaan | 15 | 216,3 | 87,4 | 318,7 | 0,91 |
| Permukiman Perdesaan | 731,8 | 703 | 793,9 | 2228,7 | 6,36 |
| Industri | 0 | 0 | 117,1 | 117,1 | 0,33 |
| Sawah Irigasi | 2082,7 | 4338 | 6146,8 | 12567,5 | 35,89 |
| Tegalan | 1091,9 | 536,9 | 1294,4 | 2923,2 | 8,35 |
| Sempadan Sungai | 1200,9 | 1528,9 | 1303,1 | 4032,9 | 11,52 |
| Hutan Produksi | 2002,9 | 1053,9 | 2715,8 | 5772,6 | 16,48 |
| Hutan Lindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Penggunaan Lahan (Ha) | Kecamatan | | | Total Luas Guna Lahan SWP VI (Ha) | Persentase Guna Lahan |
|-------------------------|--------------|-------|----------|-----------------------------------|-----------------------|
| | Tambak Kromo | Kayen | Sukolilo | | |
| Hutan Produksi Terbatas | 65,1 | 394,2 | 66,3 | 131,4 | 0,38 |
| Sawah Tadah Hujan | 902,7 | 360,9 | 371,2 | 1634,8 | 4,67 |
| Sempadan Pantai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Penggaraman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Karst Budidaya | 480 | 534,3 | 2635 | 3649,3 | 10,42 |
| Karst Lindung | 10 | 343,5 | 1275,4 | 1628,9 | 4,65 |
| Sempadan Danau | 4,8 | 8,5 | 0 | 13,3 | 0,04 |

Penggunaan lahan pada SWP VI Kabupaten Pati lebih bervariasi dibandingkan dengan SWP lainnya seta didominasi oleh lahan tidak terbangun (*nonbuilt up area*). Pada SWP VI Kabupaten Pati yang terdiri atas Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo penggunaan lahan terbesar diperuntukkan sebagai sawah irigasi dengan luas 1.2567,5 hektar atau 35,89% dari penggunaan lahan seluruhnya. Penggunaan lahan terbesar selanjutnya adalah hutan produksi seluas 5772,6 hektar (16,48%) dan sempadan sungai seluas 4.032,9 hektar (11,52%). Selain itu, seluas 3.649,3 hektar dari lahan SWP VI Kabupaten Pati diperuntukkan sebagai karst budidaya serta 1.628,9 hektar merupakan area karst lindung. Selain itu, penggunaan lahan juga diperuntukkan sebagai wilayah sempadan danau dengan luas 13,3 hektar. Guna lahan untuk kegiatan budidaya pada SWP VI Kabupaten Pati terdapat tegalan dengan luas 2923,2 hektar dan sawah tadah hujan seluas 1.634,8 hektar. Adapun penggunaan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan terbangun (*built-up area*) terdapat tiga jenis, yakni permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, dan industri. Seluas 2228,7 hektar penggunaan lahan diperuntukkan sebagai permukiman perdesaan, sedangkan penggunaan lahan untuk permukiman perkotaan seluas 318,7 hektar. Berdasarkan kondisi eksistingnya, SWP VI memiliki potensi yang sangat potensial untuk dikembangkan terutama pada sektor pertanian, perdagangan; pengangkutan, pertambangan, dan industri.



Sumber: Olah Data RTRW Kab. Pati 2010-2030.

Gambar VI.8
Satuan Wilayah Pembangunan VI (SWP VI)

b. Arah Kebijakan Wilayah Kabupaten Pati sesuai SWP

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

1) Potensi dan Keunggulan Wilayah

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Pati sebagian besar merupakan dataran rendah sehingga potensial menjadi daerah pertanian. Dominasi penggunaan lahan paling besar Kabupaten Pati adalah sawah tadah hujan, 22.163 Ha (38% dari total luas Kabupaten Pati). Potensi lain di Kabupaten Pati adalah adanya tanah kapur. Keberadaan tanah kapur berpotensi digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen. Terdapat rencana pengembangan prasarana jalan provinsi (jalan kolektor primer) yang menghubungkan wilayah daerah dengan Kawasan Perkotaan Jepara,

Kawasan Perkotaan Kudus, dan Kawasan Perkotaan Purwodadi. Selain jaringan jalan, terdapat pengembangan sistem perkeretaapian. Sistem kereta api antarkota tersebut menghubungkan Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang.

SWP Kawasan I terdiri dari empat kecamatan, yakni Kecamatan Pati, Margorejo, Gembong, dan Gabus. Pusat pengembangan SWP Kawasan I adalah Kawasan Perkotaan Pati.

SWP Kawasan II meliputi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Tlogowungu, Trangkil, serta Margoyoso. Ibukota Kecamatan Trangkil merupakan pusat pengembangan SWP Kawasan II.

Terdapat empat kecamatan yang termasuk dalam SWP Kawasan III. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cluwak, Dukuhseti, Gunungwungkal, dan Tayu. Sesuai RTRW Kabupaten Pati, maka Kawasan Perkotaan Tayu merupakan pusat pengembangan yang direncanakan pada SWP Kawasan III.

SWP Kawasan IV terdiri dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Wedarijaksa, Juwana, dan Batangan. Pusat pengembangan SWP Kawasan IV ini terletak pada Kawasan Perkotaan Juwana. Di Kecamatan Juwana direncanakan pengembangan pelabuhan niaga sebagai pendukung kegiatan industri, perdagangan dan jasa. Pelabuhan khusus juga dikembangkan untuk mendukung kegiatan industri di Kecamatan Batangan.

SWP Kawasan V meliputi empat kecamatan, yakni Kecamatan Pucakwangi, Winong, Jaken, serta Jakenan. Ibukota Kecamatan Jakenan merupakan pusat pengembangan SWP Kawasan V.

Terdapat tiga kecamatan yang termasuk dalam SWP Kawasan VI. Ketiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tambakromo, Kayen, dan Sukolilo. Sesuai RTRW Kabupaten Pati, maka Kawasan Perkotaan Kayen merupakan pusat pengembangan yang direncanakan pada SWP Kawasan VI.

2) Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pengembangan disusun dengan mempertimbangkan potensi yang ada pada wilayah. Komoditas andalan Kabupaten Pati adalah pertanian, perikanan, dan jasa pemasaran. Mengacu pada RTRW Kabupaten Pati, tujuan dari penataan ruang wilayah Kabupaten Pati adalah terwujudnya Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani. Basis tujuan tersebut yaitu keunggulan pertanian serta industri yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang ditetapkan untuk seluruh wilayah Kabupaten Pati adalah: a) meningkatnya integrasi hubungan kota-desa (*urban-hinterland*); b) meningkatnya prasarana wilayah yang mendorong ekonomi lokal; c) menguatnya sistem pertanian pada kawasan agropolitan; d) optimalnya komoditas perikanan dalam pengembangan kawasan pesisir; e) menguatnya industri berbasis potensi lokal berupa pertanian (agroindustri) dan perikanan; serta f) terwujudnya pusat pelayanan baru JAKATINATA.

3) Strategi dan Arah Kebijakan

a. SWP Kawasan I

Tabel VI.11
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan
Arah Kebijakan SWP I

| Tujuan SWP I | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|--|---|
| Pengembangan SWP I sebagai wilayah dengan fungsi; Pemerintahan Kabupaten, Perdagangan dan Jasa, Industri Pengolahan, AgroIndustri, Transportasi, dan Pertanian | Meningkatnya integrasi desa-kota (<i>urban-hinterland</i>) di wilayah SWP I | Peningkatan infrastruktur pendukung integrasi produksi-distribusi wilayah <i>urban</i> dan <i>hinterland</i> | Meningkatnya infrastruktur pendukung integrasi produksi-distribusi wilayah <i>urban</i> dan <i>hinterland</i> |
| | | Peningkatan jaringan pemasaran non-fisik wilayah produksi di <i>hinterland</i> dengan pusat perkotaan SWP I | Meningkatnya jaringan pemasaran non-fisik wilayah produksi di <i>hinterland</i> dengan pusat perkotaan SWP I |
| | Menguatnya sistem agropolitan (agro-industri) wilayah SWP I | Peningkatan produksi pertanian pada wilayah <i>hinterland</i> SWP I (Kecamatan Gembong) | Meningkatnya produksi pertanian pada wilayah <i>hinterland</i> SWP I (Kecamatan Gembong) |
| | | Peningkatan infrastruktur pendukung (proses olahan dan penyimpanan) pada wilayah Kecamatan Gembong | Meningkatnya infrastruktur pendukung (proses olahan dan penyimpanan) pada wilayah Kecamatan Gembong |
| | Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana perhubungan (transportasi) | Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan arteri penghubung internal wilayah SWP I | Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan arteri penghubung internal wilayah SWP I |
| | | Peningkatan ketersediaan jalan bebas hambatan penghubung Kabupaten Pati dan kabupaten lainnya di Pulau Jawa | Meningkatnya ketersediaan jalan bebas hambatan penghubung Kabupaten Pati dan kabupaten lainnya di Pulau Jawa |
| | Meningkatnya integrasi kawasan strategis antar wilayah SWP | Peningkatan ketersediaan infrastruktur transportasi dan pengangkutan pendukung pengembangan wilayah pesisir | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur transportasi dan pengangkutan pendukung pengembangan wilayah pesisir |
| | Meningkatnya pengembangan industri manufaktur pada SWP I | Peningkatan kuantitas industri besar pada Kecamatan Pati yang holistik dan berwawasan lingkungan | Meningkatnya kuantitas industri besar pada Kecamatan Pati yang holistik dan berwawasan lingkungan |

b. SWP Kawasan II

Tabel. VI.12
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan
Arah Kebijakan SWP II

| Tujuan SWP II | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | |
|---|--|---|--|---|
| Pengembangan SWP II sebagai wilayah dengan fungsi; Pertanian, perkebunan, perdagangan, dan agro industri. | Meningkatnya integrasi desa-kota (<i>urban-hinterland</i>) di wilayah SWP II | Peningkatan infrastruktur pendukung integrasi produksi-distribusi wilayah <i>urban</i> dan <i>hinterland</i> | Meningkatnya infrastruktur pendukung integrasi produksi-distribusi wilayah <i>urban</i> dan <i>hinterland</i> | |
| | | Peningkatan jaringan pemasaran non-fisik wilayah produksi di <i>hinterland</i> dengan pusat perkotaan SWP II | Meningkatnya jaringan pemasaran non-fisik wilayah produksi di <i>hinterland</i> dengan pusat perkotaan SWP II | |
| | Menguatnya sistem agropolitan (agro-industri) wilayah SWP II | Peningkatan produksi pertanian pada wilayah <i>hinterland</i> SWP II | Meningkatnya produksi pertanian pada wilayah <i>hinterland</i> SWP II | |
| | | Peningkatan infrastruktur pendukung (proses olahan dan penyimpanan) serta infrastruktur antar wilayah agro-industri | Meningkatnya infrastruktur pendukung (proses olahan dan penyimpanan) serta infrastruktur antar wilayah agro-industri | |
| | Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana perhubungan (transportasi) | Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana perhubungan (transportasi) | Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan arteri penghubung internal wilayah SWP II | Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan arteri penghubung internal wilayah SWP II |
| | | | Peningkatan fungsi sub-terminal wilayah | Meningkatnya fungsi sub-terminal wilayah |

c. SWP Kawasan III

Tabel. VI.13
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan
Arah Kebijakan SWP III

| Tujuan SWP III | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|--|
| Pengembangan SWP III sebagai wilayah dengan fungsi; Perdagangan dan Jasa, Perikanan, Agro Industri, Transportasi, dan Pertanian | Meningkatnya integrasi desa-kota (<i>urban-hinterland</i>) di wilayah SWP III | Peningkatan infrastruktur pendukung integrasi produksi-distribusi wilayah <i>urban</i> dan <i>hinterland</i> | Meningkatnya infrastruktur pendukung integrasi produksi-distribusi wilayah <i>urban</i> dan <i>hinterland</i> |
| | | Peningkatan jaringan pemasaran non-fisik wilayah produksi di <i>hinterland</i> dengan pusat perkotaan SWP III | Meningkatnya jaringan pemasaran non-fisik wilayah produksi di <i>hinterland</i> dengan pusat perkotaan SWP III |
| | Menguatnya sistem agropolitan (agro-industri) wilayah SWP III | Menguatnya sistem agropolitan (agro-industri) wilayah SWP III | Peningkatan produksi pertanian pada wilayah <i>hinterland</i> SWP III (Kecamatan Gunungwungkal dan Cluwak) |
| Peningkatan infrastruktur pendukung (proses | | | Meningkatnya infrastruktur pendukung (proses olahan dan |

| Tujuan SWP III | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|----------------|---|---|--|
| | Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana perhubungan (transportasi) | olahan dan penyimpanan) | penyimpanan) |
| | | Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan arteri penghubung internal wilayah SWP III | Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan arteri penghubung internal wilayah SWP III |
| | Meningkatnya integrasi kawasan strategis antar wilayah SWP | Peningkatan ketersediaan jalan bebas hambatan penghubung Kabupaten Pati dan kabupaten lainnya di Pulau Jawa | Meningkatnya ketersediaan jalan bebas hambatan penghubung Kabupaten Pati dan kabupaten lainnya di Pulau Jawa |
| | | Peningkatan integrasi infrastruktur transportasi dan pengangkutan pendukung pengembangan wilayah pesisir di Kecamatan Dukuhseti ke wilayah penunjangnya | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur transportasi dan pengangkutan pendukung pengembangan wilayah pesisir di Kecamatan Dukuhseti ke wilayah penunjangnya. |

d. SWP Kawasan IV

Tabel. VI.14
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan
Arah Kebijakan SWP IV

| Tujuan SWP IV | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|--|---|
| Pengembangan wilayah dengan fungsi; Pemerintahan Kabupaten, Perdagangan & Jasa, Industri Pengolahan, Agro Industri, Transportasi Laut, dan Pertanian | Meningkatnya integrasi desa-kota (<i>urban-hinterland</i>) di wilayah SWP IV | Peningkatan infrastruktur pendukung integrasi produksi-distribusi wilayah <i>urban</i> dan <i>hinterland</i> | Meningkatnya infrastruktur pendukung integrasi produksi-distribusi wilayah <i>urban</i> dan <i>hinterland</i> |
| | | Peningkatan jaringan pemasaran non-fisik wilayah produksi di <i>hinterland</i> dengan pusat pelayanan | Meningkatnya jaringan pemasaran non-fisik wilayah produksi di <i>hinterland</i> dengan pusat pelayanan |
| | Menguatnya sistem agropolitan (agro-industri) wilayah SWP IV | Peningkatan produksi pertanian pada wilayah <i>hinterland</i> | Meningkatnya produksi pertanian pada wilayah <i>hinterland</i> |
| | | Peningkatan infrastruktur pendukung (proses olahan dan penyimpanan) | Meningkatnya infrastruktur pendukung (proses olahan dan penyimpanan) |
| | Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana perhubungan (transportasi) | Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan arteri penghubung internal wilayah SWP IV | Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan arteri penghubung internal wilayah SWP IV |
| | | Peningkatan fungsi kawasan SWP IV sebagai salah satu pusat penghubung (hub) bagi transportasi laut | Meningkatnya fungsi kawasan SWP IV sebagai salah satu pusat penghubung (hub) bagi transportasi laut |
| | | Peningkatan ketersediaan jalan bebas | Meningkatnya ketersediaan jalan bebas |

| Tujuan SWP IV | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---------------|--|---|--|
| | | hambatan penghubung Kabupaten Pati dan kabupaten lainnya di Pulau Jawa | hambatan penghubung Kabupaten Pati dan kabupaten lainnya di Pulau Jawa |
| | Meningkatnya integrasi kawasan strategis antar wilayah SWP | Peningkatan ketersediaan infrastruktur transportasi dan pengangkutan pendukung pengembangan wilayah pesisir | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur transportasi dan pengangkutan pendukung pengembangan wilayah pesisir |
| | Meningkatnya pengembangan industri pada SWP IV | Peningkatan kuantitas industri yang holistik dan berwawasan lingkungan | Meningkatnya kuantitas industri besar dan berwawasan lingkungan |

e. SWP Kawasan V

Tabel. VI.15
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan
Arah Kebijakan SWP V

| Tujuan SWP V | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | |
|--|---|--|---|--|
| Pengembangan SWP V sebagai wilayah dengan fungsi; Perdagangan & Jasa, Agro Industri, Peternakan, dan Pertanian | Meningkatnya integrasi desa-kota (<i>urban-hinterland</i>) di wilayah SWP V | Peningkatan infrastruktur pendukung integrasi produksi-distribusi wilayah <i>urban</i> dan <i>hinterland</i> | Meningkatnya infrastruktur pendukung integrasi produksi-distribusi wilayah <i>urban</i> dan <i>hinterland</i> | |
| | | Peningkatan jaringan pemasaran non-fisik wilayah produksi di <i>hinterland</i> dengan pusat pelayanan | Meningkatnya jaringan pemasaran non-fisik wilayah produksi di <i>hinterland</i> dengan pusat pelayanan | |
| | Menguatnya sistem agropolitan (agro-industri) wilayah SWP V | Peningkatan produksi pertanian pendukung agro industri pada wilayah <i>hinterland</i> SWP V | Meningkatnya produksi pertanian pendukung agro industri pada wilayah <i>hinterland</i> SWP V | |
| | | Peningkatan infrastruktur pendukung (proses olahan dan penyimpanan) | Meningkatnya infrastruktur pendukung (proses olahan dan penyimpanan) | |
| | Meningkatnya integrasi kawasan strategis antar wilayah SWP | | Peningkatan ketersediaan infrastruktur transportasi dan pengangkutan pendukung pengembangan wilayah pertanian | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur transportasi dan pengangkutan pendukung pengembangan wilayah pertanian |
| | | | | |

f. SWP Kawasan VI

Tabel VI.16
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan
Arah Kebijakan SWP VI

| Tujuan SWP VI | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|--|---|
| Pengembangan SWP VI sebagai wilayah dengan fungsi; Perdagangan & Jasa, Industri, Peternakan, dan Pertanian | Meningkatnya integrasi desa-kota (<i>urban-hinterland</i>) di wilayah SWP VI | Peningkatan infrastruktur pendukung integrasi produksi-distribusi wilayah <i>urban</i> dan <i>hinterland</i> | Meningkatnya infrastruktur pendukung integrasi produksi-distribusi wilayah <i>urban</i> dan <i>hinterland</i> |
| | | Peningkatan jaringan pemasaran non-fisik wilayah produksi di <i>hinterland</i> dengan pusat perkotaan | Meningkatnya jaringan pemasaran non-fisik wilayah produksi di <i>hinterland</i> dengan pusat perkotaan |
| | Menguatnya sistem agropolitan (agro-industri) wilayah SWP VI | Peningkatan produksi pertanian pada wilayah <i>hinterland</i> SWP VI | Meningkatnya produksi pertanian pada wilayah <i>hinterland</i> SWP VI |
| | | Peningkatan infrastruktur pendukung (proses olahan dan penyimpanan) pada wilayah Kecamatan Gembong | Meningkatnya infrastruktur pendukung (proses olahan dan penyimpanan) pada wilayah Kecamatan Gembong |
| | Meningkatnya industri pertambangan pada SWP VI | Peningkatan kuantitas industri pertambangan yang berwawasan lingkungan | Meningkatnya kuantitas industri pertambangan yang berwawasan lingkungan |

c. Sinergi Antar-SWP di Kabupaten Pati

Setiap Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) memiliki potensi yang beragam oleh karenanya dapat dilakukan melalui pembentukan benang-benang interaksi yang kuat di antara SWP baik I, II, III, IV, V, dan VI (Lihat Tabel VI. 19). Adanya potensi di satu SWP bisa jadi mampu mengatasi masalah yang ada di SWP lainnya. Untuk itulah interaksi diperlukan sehingga tercapai simbiosis mutualisme dan mampu meminimalisir kesenjangan yang saat ini terjadi bahkan dimaksudkan untuk bisa mengoptimalkan.

Potensi yang menonjol dari SWP I adalah tersedianya ruang yang cukup sebagai area pengembangan kota. Selain itu, keberadaan jalur pantura menjadikan tingginya aksesibilitas di SWP I. Selain memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai *Central Business District* kawasan kota dengan skala pelayanan kota, juga memiliki peluang untuk dikembangkan produksi pertanian *hinterland* dan industri. Wilayah ini akan berkontribusi terhadap SWP di sekitarnya, terutama SWP II, IV, dan V dalam konteks pengembangan wilayah pesisir. Sementara untuk SWP lainnya yang berorientasi pada

pengembangan agroindustri, fungsi utama SWP I dapat mendukung pemasaran hasil produksi sebagai pusat perdagangan.

Potensi SWP II yang menonjol adalah potensi pengembangannya sebagai pusat pertumbuhan kawasan pesisir. Peluang yang dapat disinergikan dengan SWP I ini akan memperkuat keterkaitan antar wilayah yang memberikan *multipliereffect* yang lebih besar bagi wilayah *hinterland* lainnya. Potensi ini juga mampu bersinergi dengan arahan fungsi yang sama di SWP III dan SWP IV untuk pengembangan wilayah pesisir yang terintegrasi.

SWP III memiliki potensi dualisme fungsi selain sebagai pusat pengembangan wilayah pesisir, juga sebagai wilayah pusat pengembangan produksi pertanian. Keadaan ini memungkinkan SWP III berkontribusi terhadap wilayah pesisir lainnya seperti SWP II dan IV sebagai jejaring pusat pertumbuhan wilayah pesisir yang terintegrasi. Sementara untuk SWP lainnya yang memiliki potensi pengembangan pertanian seperti SWP V dan VI, SWP III mampu memperkuat jejaring pusat pengembangan pertanian. Penguatan jejaring ini dapat berkontribusi untuk meratakan kesejahteraan di pusat pertumbuhan dan wilayah penunjangnya.

Sementara untuk potensi SWP IV sebagai wilayah industri akan berkontribusi terhadap wilayah pesisir yang termasuk dalam SWP II dan SWP III sebagai pusat pengolahan. Sementara fungsi sinergitas dengan SWP I dari sistem transportasi dan industri memungkinkan pengembangan wilayah yang lebih merata dan *multiplier effect* pertumbuhan pada SWP yang terletak di sekitar SWP IV dan SWP I. Selain itu, dengan adanya arahan fungsi konservasi alam di wilayah SWP IV akan menjaga kelestarian (*sustainability*) alam yang bermanfaat bagi keseluruhan wilayah Kabupaten Pati.

Potensi yang menonjol dari SWP V adalah pengembangan pusat perkembangan Kota JAKATINATA yang menjadi simpul pertumbuhan yang terintegrasi dengan simpul pertumbuhan lainnya, terutama SWP I. Sementara manfaatnya untuk wilayah dengan fungsi pertanian, pengembangan kota sebagai pusat pertumbuhan baru dapat bermanfaat sebagai pusat pemasaran produk pertanian seperti pada SWP II dan SWP III. Selain itu, SWP V juga memiliki fungsi konservasi alam yang berfungsi untuk kelestarian alam keseluruhan wilayah Kabupaten Pati.

SWP VI memiliki fungsi yang paling menonjol sebagai simpul produksi dan distribusi pertanian bagi SWP sekitarnya yang memiliki fungsi sebagai wilayah pengembangan pertanian. Pada SWP VI juga memiliki fungsi arahan utama pusat pertumbuhan kota terintegrasi JAKATINATA yang dapat disinergikan dengan pusat pertumbuhan di SWP I. Sinergi yang diperkuat dengan integrasi sistem transportasi ini akan bermanfaat untuk pemerataan kesejahteraan pada wilayah *hinterland*.

Tabel. VI. 17
Keterkaitan Kondisi Guna Lahan, RTRW, KLHS, dan Arah Program

| Kondisi Guna Lahan | RTRW Pati 2010-2030 | KLHS | Arah Program |
|--|---|--|---|
| SWP Kawasan I | | | |
| 1) Permukiman Perkotaan = 7,13% 2) Permukiman Perdesaan = 9,65% 3) Industri = 2,03% 4) Sawah Irigasi = 30,16% 5) Tegalan = 15,54% 6) Sempadan Sungai = 14,11% 7) Hutan Produksi = 9,40% 8) Hutan Lindung = 5,14% 9) Hutan Produksi Terbatas = 2,14% 10) Sawah Tadah Hujan = 4,69% | <ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan memiliki fungsi pokok sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten • Pengembangan kawasan agropolitan Gembong • Kecamatan Margorejo dan Kecamatan Pati direncanakan sebagai kawasan industri manufaktur | <ul style="list-style-type: none"> • Mengatur lalu lintas pengangkutan bahan bangunan dan peralatan bukan pada jam padat lalu lintas (saat konstruksi pembangunan sarana prasarana) • Optimalisasi lahan pertanian untuk produksi pangan • Menanam pohon di sekeliling pembangunan sarpras industri yang mampu menyerap polutan dan bising (pohon bertajuk tebal) | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya sarpras aparatur penunjang kawasan pusat pemerintahan skala kabupaten dengan peningkatan kualitas dan kuantitas jalan penghubung internal wilayah SWP Kawasan I • Peningkatan produksi pertanian pada <i>hinterland</i> SWP I (kawasan agropolitan Gembong) dengan infrastruktur pendukung (produksi dan penyimpanan/ lumbung) • Peningkatan kualitas dan kuantitas industri di Kecamatan Pati dan Kecamatan Margorejo yang holistik dan berwawasan lingkungan |
| SWP Kawasan II | | | |
| 1) Permukiman Perkotaan = 3,95% 2) Permukiman Perdesaan = 14,84% 3) Industri 4) Sawah Irigasi = 15,41% | <ul style="list-style-type: none"> • Letaknya yang strategis di antara segitiga kawasan cepat tumbuh bagian utara (Pati, Juwana, Tayu) sehingga direncanakan menjadi pusat pengembangan baru • Pengembangan kawasan strategis pesisir dan pantai yang masuk dalam | <ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan lokasi pembangunan sarana dan prasarana kawasan pengembangan baru pada daerah yang tidak rawan bencana • Pemilihan lokasi pembangunan sarana pendukung dermaga TPI pada daerah yang tidak rawan bencana | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan infrastruktur pendukung produksi-distribusi perikanan yang terintegrasi antarwilayah pesisir dan internal SWP II • Pengembangan wilayah pesisir dengan peningkatan sarana dan prasarana (proses olahan dan penyimpanan) |

| Kondisi Guna Lahan | RTRW Pati 2010-2030 | KLHS | Arah Program |
|--|--|--|--|
| 5) Tegalan = 34,33% 6) Sempadan Sungai = 18,72% 7) Hutan Produksi = 8,30% 8) Hutan Lindung = 0,59% 9) Hutan Produksi Terbatas = 1,38% 10) Sawah Tadah Hujan = 1,46% 11) Sempadan Pantai = 0,56% 12) Penggaraman = 0,47% | Wilayah Pengembangan Pesisir II (WPP II) yakni Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Trangkil, dan Kecamatan Wedarijaksa <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan industri agro dan pertambangan diarahkan pada Kecamatan Trangkil dan Kecamatan Margoyoso • Kawasan rawan pencemaran industri di Kecamatan Margoyoso | <ul style="list-style-type: none"> • Menanam pohon di sekeliling pembangunan sarpras industri yang mampu menyerap polutan dan bising (pohon bertajuk tebal) | daerah perikanan tangkap <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan infrastruktur pendukung produksi-distribusi perikanan yang terintegrasi antarwilayah • Peningkatan kualitas industri di Kecamatan Margoyoso dan Kecamatan Trangkil yang holistik dan berwawasan lingkungan |
| SWP Kawasan III | | | |
| 1) Permukiman Perkotaan = 3,07% 2) Permukiman Perdesaan = 11,68% 3) Industri = 0% 4) Sawah Irigasi = 12,67% 5) Tegalan = 26,16% 6) Sempadan Sungai = 17,70% 7) Hutan Produksi = 16,99% 8) Hutan Lindung = 1,64% 9) Hutan Produksi | <ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kawasan strategis Pelabuhan Pendaratan Ikan Dukuhseti (PPI Puncel) • Kecamatan Cluwak dan Kecamatan Gunungwungkal sebagai kawasan pertanian • Rencana pengembangan koridor Kota Pati – Kota Tayu • Kawasan industri agro dan pertambangan diarahkan ke Kecamatan Tayu | <ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan lokasi pembangunan sarana pendukung dermaga TPI pada daerah yang tidak rawan bencana • Optimalisasi lahan pertanian untuk produksi pangan • Menanam pohon di sekeliling pembangunan sarpras industri yang mampu menyerap polutan dan bising (pohon bertajuk tebal) | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan infrastruktur pendukung produksi - distribusi perikanan yang terintegrasi antarwilayah pesisir dan internal SWP III • Pengembangan wilayah pesisir dengan peningkatan sarana dan prasarana (proses olahan dan penyimpanan) daerah perikanan tangkap • Peningkatan produksi pertanian pada <i>hinterland</i> SWP III (kawasan Cluwak dan Gunungwungkal) dengan infrastruktur pendukung (produksi dan penyimpanan/ lumbung) • Peningkatan jaringan perhubungan pusat perkotaan SWP III dengan |

| Kondisi Guna Lahan | RTRW Pati 2010-2030 | KLHS | Arah Program |
|---|---|---|---|
| Terbatas = 1,85% 10) Sawah Tadah Hujan = 5,37% 11) Sempadan Pantai = 0,27% 12) Tambak = 2,6% | | | <i>hinterland</i> dan perkotaan Tayu dengan Kota Pati <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas industri di Kecamatan Tayu yang holistik dan berwawasan lingkungan |
| SWP Kawasan IV | | | |
| 1) Permukiman Perkotaan = 4,20% 2) Permukiman Perdesaan = 4,49% 3) Industri = 1,43% 4) Sawah Irigasi = 60,74% 5) Tegalan = 2,75% 6) Sempadan Sungai = 12,88% 7) Hutan Produksi = 0,32% 8) Hutan Lindung = 0% 9) Hutan Produksi Terbatas = 0% 10) Sawah Tadah Hujan = 0,25% 11) Sempadan Pantai = 0,51% 12) Penggaraman = 0,36% 13) Tambak = 12,07% | <ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai kawasan strategis pelabuhan Juwana serta ditetapkan sebagai Wilayah Pengembangan Pesisir III (Juwana & Batangan) dengan produk perikanan terbesar • Letak yang strategis di Jalan Pantura dan jalur pesisir WANARAKUTI sehingga terdapat rencana pengembangan koridor pertumbuhan Kota Pati – Kota Juwana • Kecamatan Juwana dan Kecamatan Batangan direncanakan untuk industri manufaktur dan perikanan • Berperan sebagai kawasan konservasi rawa payau dan mangrove | <ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan lokasi pembangunan sarana pendukung dermaga TPI pada daerah yang tidak rawan bencana • Pemilihan lokasi pembangunan sarana dan prasarana kawasan pengembangan baru pada daerah yang tidak rawan bencana • Menanam pohon di sekeliling pembangunan sarpras industri yang mampu menyerap polutan dan bising (pohon bertajuk tebal) • Alih fungsi lahan diarahkan pada lahan yang bukan produktif | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan/ wilayah pesisir serta penunjang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan • Peningkatan jaringan perhubungan internal SWP III dan perkotaan Juwana dengan Kota Pati • Peningkatan kualitas industri di Kecamatan Juwana dan Batangan yang holistik serta berwawasan lingkungan • Peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendukung konservasi hutan mangrove di Kecamatan Juwana dan Batangan |
| SWP Kawasan V | | | |

| Kondisi Guna Lahan | RTRW Pati 2010-2030 | KLHS | Arah Program |
|---|---|--|--|
| 1) Permukiman Perkotaan = 0,85% 2) Permukiman Perdesaan = 10,46% 3) Industri = 1,43% 4) Sawah Irigasi = 60,74% 5) Tegalan = 2,75% 6) Sempadan Sungai = 12,88% 7) Hutan Produksi = 0,32% 8) Hutan Lindung = 0% 9) Hutan Produksi Terbatas = 0% 10) Sawah Tadah Hujan = 0,25% 11) Sempadan Pantai = 0,51% 12) Penggaraman = 0,36% 13) Tambak = 12,07% | <ul style="list-style-type: none"> • Direncanakan sebagai kawasan strategis perkotaan JAKATINATA (Jakenan, Kayen, Pati, Juwana, Tayu) • Pengembangan dengan konsep kota kecil yang berbasis agraris • Kawasan batuan kapur (<i>karst</i>) Pegunungan Kendeng menjadi kawasan resapan air di Kecamatan Winong dan Pucakwangi | <ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan lokasi pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan yang tidak rawan bencana • Alih fungsi lahan diarahkan pada lahan yang bukan produktif • Optimalisasi lahan pertanian untuk produksi pangan | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana pendukung integrasi sistem perkotaan JAKATINATA dengan wilayah internal SWP V • Peningkatan fasilitas penunjang produksi dan penyimpanan hasil pertanian, serta sistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian • Peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendukung konservasi kawasan lindung karst di Kecamatan Pucakwangi dan Kecamatan Winong |
| SWP Kawasan VI | | | |
| 1) Permukiman Perkotaan = 0,91% 2) Permukiman Perdesaan = 6,36% 3) Industri = 0,33% 4) Sawah Irigasi = 35,89% 5) Tegalan = 8,35% | <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh kecamatan di SWP VI (Kecamatan Sukolilo, Kayen, dan Tambakromo) merupakan kawasan batuan kapur (<i>karst</i>) Pegunungan Kendeng bagian selatan • Direncanakan sebagai kawasan strategis perkotaan JAKATINATA (Jakenan, Kayen, Pati, Juwana, Tayu) | <ul style="list-style-type: none"> • Alih fungsi lahan diarahkan pada lahan yang bukan produktif • Pemilihan lokasi pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan yang tidak rawan bencana • Optimalisasi lahan pertanian untuk produksi pangan | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendukung konservasi kawasan lindung karst sebagai resapan air • Peningkatan sarana dan prasarana pendukung integrasi sistem perkotaan JAKATINATA dengan wilayah internal SWP VI • Peningkatan produksi pertanian pada |

| Kondisi Guna Lahan | RTRW Pati 2010-2030 | KLHS | Arah Program |
|--|---|-------------|--|
| 6) Sempadan Sungai = 11,52% 7) Hutan Produksi = 16,48% 8) Hutan Lindung = 0% 9) Hutan Produksi Terbatas = 0,38% 10) Sawah Tadah Hujan = 4,67% 11) Karst Budidaya = 10,42% 12) Karst Lindung = 4,65% 13) Sempadan Danau= 0,04% | <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kayen ditetapkan sebagai kawasan agropolitan dengan sentra produksi pertanian | | Kecamatan Kayen dengan infrastruktur pendukung (produksi dan penyimpanan/ lumbung) <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitas penunjang sentra produksi pertanian • Pembangunan fasilitas penunjang pariwisata |

Setiap SWP memiliki masalah dan potensi masing-masing. Keberadaan potensi di suatu SWP bisa jadi mampu mengatasi masalah di SWP lainnya. Untuk itulah diperlukan interaksi yang sinergi antar SWP di Kabupaten Pati.

Dalam rangka pengembangan kewilayahan Kabupaten Pati, maka dilakukan arahan program pengembangan wilayah Kabupaten Pati melalui:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pengembangan kawasan
 - Sarpras aparaturnya penunjang kawasan pusat pemerintahan skala kabupaten di SWP I
 - Jaringan perhubungan di kawasan cepat tumbuh SWP II, koridor Pati-Tayu di SWP III, dan koridor Pati - Juwana di SWP IV
 - Sarana prasarana pendukung integrasi sistem perkotaan JAKATINATA (Jakenan, Kayen, Pati, Juwana, Tayu)
- b. Peningkatan jalur penghubung internal wilayah
- c. Peningkatan produksi pertanian dengan fasilitas dan infrastruktur
 - SWP I (kawasan agropolitan Gembong), SWP III (kawasan Cluwak dan Gunungwungkal), dan SWP VI (Kecamatan Kayen) dengan fasilitas pendukung produksi dan penyimpanan/lumbung
 - SWP V dengan fasilitas penunjang produksi dan jaringan distribusi hasil pertanian
 - SWP VI dengan fasilitas penunjang sentra produksi pertanian
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas industri yang holistik dan berwawasan lingkungan di SWP I (Margorejo dan Pati), SWP II (Margoyoso dan Trangkil), SWP III (Tayu), dan SWP IV (Juwana dan Batangan)
- e. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perikanan dan distribusi pemasaran hasil perikanan pada SWP II, SWP III, dan SWP IV
- f. Pengembangan wilayah pesisir yang terintegrasi antarwilayah dengan peningkatan sarpras (proses olahan & penyimpanan) daerah perikanan tangkap
 - WPP I pada SWP Kawasan III dengan peningkatan fasilitas pendukung Pelabuhan Pendaratan Ikan Dukuhseti
 - WPP II pada SWP Kawasan II
 - WPP III pada SWP Kawasan IV dengan peningkatan fasilitas pendukung Pelabuhan Juwana
- g. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan lindung
 - Konservasi hutan mangrove di SWP IV (Juwana dan Batangan)
 - Konservasi karst di SWP V dan SWP VI

6.4 Rencana Program Pembangunan Daerah

Selanjutnya akan disajikan program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif yang menjadi prioritas daerah kurun 2017-2022.

Tabel VI.16
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF KABUPATEN PATI

